



**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
PADA PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA SEMARANG**

TESIS

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2

Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

Rifki Firmansyah

B4B 008 223

PEMBIMBING :

SURADI, SH., M.Hum.

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2010

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN PADA PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA
SEMARANG**

Disusun Oleh :

Rifki Firmansyah

B4B 008 056

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2

Program Studi Magister Kenotariatan

Pembimbing,

SURADI, SH., M.Hum.

NIP. 195709111984031003

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN PADA PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA
SEMARANG**

Disusun Oleh :

Rifki Firmansyah

B4B 008 223

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 14 Juni 2010

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Diponegoro

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan

Universitas

Suradi SH., M.Hum.

NIP. 195709111984031003

H. Kashadi, SH., MH.

NIP.195406241982031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifki Firmansyah

dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi/lembaga pendidikan manapun.

Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non-komersial.

Semarang, 20 Juni 2010

Yang Menyatakan,

Rifki Firmansyah

NIM : B4B 008 223

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. Andalan Finance Indonesia Semarang”. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi meraih gelas Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini terdapat kekurangan dalam hal materi maupun segi penulisan. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap tesis ini nantinya akan bermanfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS. Med., Sp. And. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA., Ph. D. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. DR. Arief Hidayat, SH., MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

4. Bapak H. Kashadi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, SH., MS. selaku Sekretaris I Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bapak Dr. Suteki, SH., M.Hum. selaku Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
7. Bapak Suradi, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing tesis.
8. Bapak Srie Wiletno, SH., MS. selaku dosen wali penulis selama perkuliahan di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
9. Tim *reviewer* proposal penelitian serta tim penguji tesis yaitu Bapak H. Kashadi, SH., MH., Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, SH., MS., Bapak Dr. Suteki, SH., M.Hum., Bapak Suradi, SH., M.Hum., dan Bapak H. Achmad Busro, SH., M.Hum., Bapak Ery Agus Priyono, SH., Msi.
10. Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
11. Staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
12. Para responden yang telah membantu jalannya penelitian, yaitu Bapak Ratriana Heksa Setiawan selaku *Credit Analyst* pada PT. Andalan finance Indonesia Semarang, Ibu Retno Dewi selaku *Assistant Manager* pada PT. Andalan finance Indonesia Semarang, Bapak Agus Priyambodo selaku *Branch Manager* pada PT. Andalan finance Indonesia Semarang.

13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama menempuh studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu hokum pada umumnya dan hokum perkreditan bank pada khususnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juni 2010

Penulis

ABSTRAK

Penelitian “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Andalan Finance Indonesia Semarang” bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen antara PT.Andalan Finance Indonesia Semarang dengan konsumen dan untuk mengetahui penyelesaian apabila pihak konsumen wanprestasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analitis berdasarkan sumber data primer dan sekunder yang didapat dari studi kepustakaan dan studi lapangan yang akan diteliti dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan-tahapan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Andalan Finance Indonesia Semarang dengan konsumen adalah tahap permohonan pembiayaan oleh konsumen, tahap pemeriksaan permohonan pembiayaan konsumen, tahap rekomendasi, tahap persiapan dokumen kontrak, dan tahap pencairan pembiayaan konsumen. Sedangkan bentuk perjanjian kredit antara PT. Andalan Finance Indonesia Semarang dengan konsumen adalah perjanjian baku (perjanjian standar), dan menggunakan pengakuan hutang dan pentingnya menggunakan pengakuan utang adalah bahwa PT. Andalan Finance Indonesia Semarang padahal ini sebagai Kreditur memperoleh jaminan akan pengembalian utangnya, akta pengakuan hutang tidak termasuk salah satu jaminan hutang yang diatur oleh undang-undang karena bukan sebagai jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, akan tetapi kreditur merasa keamanan piutangnya terjamin. Penyelesaian apabila konsumen wanprestasi adalah dengan cara musyawarah, penagihan, pemberian somasi atau teguran dan gugatan kepada konsumen.

Kata Kunci : Pelaksanaan Pembiayaan Konsumen, Konsumen Wanprestasi.

ABSTRACT

The purpose of the “Consumer Financing Agreement Implementation at PT. Andalan Finance Indonesia Semarang” is to know how the implementation of the financing agreement between PT. Andalan Finance Indonesia Semarang with consumers and to determine if the settlement of the consumer in default.

For the research methods, this thesis is using legal empirical approach, specification research using descriptive analytical method based on primary and secondary sources of data obtained from literature studies and field studies that will be examined with qualitative analysis.

The results showed that the stages of implementing the financing agreement between PT. Andalan Finance Indonesia Semarang and consumer is the is the financing request by the consumer, the examination stage, the recommendation phase, the contract document preparation, and disbursement stage. The agreement between PT. Andalan Finance Indonesia Semarang and the consumer is use the standard contract. If there is consumer default problems, it can be solved with recoordination between PT. Andalan Finance Indonesia Semarang and consumer, billing, provision of claim letter or sue to the consumer.

Suggestions that can be given is that the government need to be more active in regulate the rule of consumer financing, PT. Andalan Finance Indonesia Semarang need to improve their prudential finance, and consumer’s good aim.

Keywords: Implementation of Consumer Finance, Consumer in Default.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Metode Penelitian	13
1. Metode Pendekatan	13
2. Spesifikasi Penelitian	13
3. Metode Pengumpulan Data	14
4. Lokasi Penelitian dan Responden	15
5. Tahap Penelitian	15
6. Metode Analisis Data	16
7. Pengolahan Data	17

	G. Sistematika Penelitian	17
BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	21
	1. Pengertian Perjanjian	21
	2. Asas-Asas Perjanjian	23
	3. Syarat Sahnya Perjanjian	30
	4. Objek dan Subjek Perjanjian	35
	5. Unsur-Unsur Hukum Perjanjian.....	37
	6. Jenis-Jenis Perjanjian.....	38
	7. Wanprestasi.....	40
	B. Tinjauan Tentang Pembiayaan Konsumen	43
	1. Pengertian Pembiayaan konsumen	43
	2. Perbedaan Pembiayaan Konsumen dengan Sewa Guna Usaha	47
	3. Pihak-Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen ..	49
	C. Tinjauan Tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen	53
	1. Bentuk dan Isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen	53
	2. Jaminan Pada Pembiayaan Konsumen	54
	3. Jaminan Fidusia	56
	4. Berakhirnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen	63
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Tahap-Tahap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan konsumen dan mengapa harus dengan pengakuan hutang antara PT. Andalan Finance Indonesia Semarang	65
B. Penyelesaian Dalam Hal Apabila Pihak Konsumen Wanprestasi	94

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran-Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I	Tabel Kerangka Dasar/Indikasi Keputusan Pembiayaan Konsumen.....	75
Tabel II	Tabel Kenaikan Suku Bunga Per Tahun Yang Dialami PT. Andalan Finance Indonesia Semarang	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Program pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah ini meliputi berbagai macam bidang yaitu meliputi bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, SDA dan lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan. Program pembangunan ini merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah dan penyelenggara negara lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun. Pembangunan ekonomi ini sangat berpengaruh penting dalam upaya menciptakan suatu masyarakat dengan perekonomian yang baik. Tiga hal vital yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan keberadaan suatu negara, ketiga hal tersebut adalah masalah politik, hukum dan ekonomi. Ketiga hal tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Semakin meningkatnya ekonomi suatu negara maka akan meningkat pula kebutuhan hidup masyarakat yang tinggal dalam negara tersebut. Kebutuhan konsumtif masyarakat baik kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier mau tidak mau harus mereka penuhi dan apabila mereka hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan primer saja, atau primer dan sekunder saja maka mereka akan mencari cara agar kebutuhan sekunder atau tersiernya bisa terpenuhi.

Mobilitas masyarakat yang semakin meningkat baik di daerah dan di perkotaan. Sejalan dengan terus berkembangnya pembangunan infrastruktur yang tidak diimbangi dengan meningkatnya pemenuhan akan transportasi umum oleh pemerintah maka menyebabkan kebutuhan akan kendaraan pribadi pun meningkat. Kebutuhan akan tersedianya alat transportasi tidak dapat dipungkiri lagi. Minimnya ketersediaan dan kenyamanan dari transportasi umum menyebabkan masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi.

Kemajuan dibidang teknologi telah memacu perusahaan untuk menghasilkan produk yang semakin canggih dan beragam. Kelebihan atas suatu produk terbaru mendorong masyarakat (konsumen) tergiur untuk memilikinya meskipun barangkali secara finansial dana untuk membelinya tidak mencukupi. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan rendah hal ini tentu merupakan problem tersendiri. Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya.

Kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan secara mengangsur, tetapi banyaknya kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, maka untuk memenuhinya, cara yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan tersebut pun bermacam-macam. Salah satu contohnya yaitu menggunakan jasa lembaga keuangan bank maupun yang bukan bank. Bentuk dari lembaga bukan bank yang dapat membantu masyarakat adalah lembaga pembiayaan.

Lembaga Pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.¹ Lembaga pembiayaan juga diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Sesuai dengan sifatnya maka lembaga pembiayaan dijadikan suatu jalur pemasaran barang-barang konsumtif yang bernilai tinggi salah satunya adalah kendaraan.

Lembaga pembiayaan sebagai suatu badan usaha memiliki produk-produk usaha yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya selain dengan cara tunai. Produk-produk usaha tersebut antara lain adalah sewa guna usaha (*leasing*), modal ventura (*venture capital*), anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen (*consumer finance*), kartu kredit (*credit card*) dan perdagangan surat berharga (*securities company*). Produk-produk usaha ini akan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan akan kendaraan pribadi seperti mobil. Salah satu produk yang paling sering digunakan adalah pembiayaan konsumen.

PT. Andalan Finance Indonesia Semarang adalah salah satu bentuk dari lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia yang memfokuskan bidangnya dalam pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, khususnya mobil. Sebagai suatu lembaga pembiayaan, PT. Andalan Finance Indonesia Semarang memiliki produk-produk usaha yang salah satunya adalah pembiayaan konsumen.

Dalam praktek perjanjian pembiayaan konsumen menggunakan perjanjian baku dan standar, yaitu dituangkan dalam bentuk formulir (*legal document*). Dari segi biaya dan waktu bentuk perjanjian ini memang lebih hemat, tetapi apabila diamati perjanjian ini akan menguntungkan pihak PT. Andalan finance Indonesia Semarang karena isi perjanjiannya ditentukan sepihak, sehingga dalam keadaan demikian pemohon hanya bersikap pasif yaitu tinggal menyatakan menerima atau menolak isi dari perjanjian pembiayaan konsumen tersebut.

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 1.

Oleh karena itulah berdasarkan dari latar belakang yang sudah penulis uraikan, penulis tertarik dan mempunyai keinginan untuk mengetahui secara langsung lebih mendalam lagi dan mengadakan penelitian dengan tema sekaligus judul “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Andalan Finance Indonesia Semarang”

B. PERUMUSAN MASALAH

Pembahasan dalam tesis yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Andalan Finance Indonesia Semarang” akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dan mengapa harus dengan pengakuan hutang pada PT. Andalan Finance Indonesia Semarang?
2. Bagaimana penyelesaian dalam hal apabila pihak konsumen wanprestasi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dan syarat-syaratnya, dan mengetahui mengapa menggunakan pengakuan hutang dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Andalan Finance Indonesia Semarang.
2. Untuk dapat mengetahui penyelesaiannya apabila pihak konsumen melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Andalan Finance Indonesia Semarang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Tesis ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan secara teoritis bagi penulis sendiri maupun para pembaca tesis ini, termasuk para pembimbing serta penguji tesis perdata khususnya dalam hukum tentang perjanjian pembiayaan konsumen.

2. Manfaat Praktis

Penulis memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan yang berhubungan dengan perjanjian pembiayaan konsumen kepada para praktisi perusahaan pembiayaan dan masyarakat pada umumnya yang menggunakan perjanjian pembiayaan konsumen dan ini dapat menjadi sarana transfer pemikiran serta pembandingan dalam praktek pelaksanaan bidang hukum perdata terutama dalam lingkup perjanjian sehingga para pembaca dapat menghasilkan pemikiran yang lebih baik dan bijaksana.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Kerangka Konseptual

Perjanjian pembiayaan konsumen pada dasarnya merupakan perjanjian *obligatoir* oleh karenanya perjanjian tersebut dapat dibuat dengan baku, yang dibuat oleh salah satu pihak yang secara ekonomi lebih kuat. Perjanjian pembiayaan konsumen dibuat secara baku lebih menguntungkan pada hak-hak pihak yang membuat perjanjian tersebut, sebagai pihak yang lain hanya mengikuti setuju atau tidak setuju atas perjanjian pembiayaan konsumen tersebut.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan bentuk perjanjian yang khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian baku pembiayaan konsumen (*consumer*

finance agreement) merupakan “dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata”.²

Awal Terjadinya perjanjian pembiayaan konsumen, adalah konsumen sebagai debitur mendatangi lembaga pembiayaan sebagai konsumen untuk membiayai keperluannya konsumen pada dealer supplier secara tunai, dengan memenuhi persyaratan dan dokumen-dokumen yang ditetapkan oleh lembaga pembiayaan, dan konsumen (debitur) membayar secara angsuran beserta bunga kepada lembaga pembiayaan, setelah dokumen disetujui oleh lembaga pembiayaan, lembaga pembiayaan memberikan surat kepada supplier untuk memberikan barang kepada konsumen, konsumen menyerahkan surat penerima barang apa bila barang tersebut telah diterima oleh konsumen, dan oleh lembaga pembiayaan diikat dengan asuransi, apabila barang tersebut hilang atau rusak tanpa kesengajaan dari pihak konsumen maka pihak asuransilah yang memberikan ganti kerugian pembayaran kepada lembaga pembiayaan untuk mengganti kerugian konsumen tersebut. Perjanjian pembiayaan konsumen tersebut diikat dengan perjanjian asuransi untuk menjaga barang objek pembiayaan konsumen, juga diikat dengan perjanjian fidusia agar lembaga pembiayaan sebagai debitur tidak mengalami kerugian apabila konsumen wanprestasi.

2. Kerangka Teoritik

a. Pengertian Perjanjian

”Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Jika diperhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirnya kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.

b. Asas-asas Perjanjian

1) Asas Kepribadian (personality)

² *Ibid*, hal. 99.

Asas kepribadian ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul, tidak diperlukan suatu formalitas dan dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu cukup secara lisan saja. Pada umumnya perjanjian itu adalah sah dalam arti sudah mengikat, apabila sudah tercapai suatu kesepakatan yang pokok dalam perjanjian.

3) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah diatur dalam undang-undang ataupun belum diatur dalam undang-undang. Karena hukum perjanjian mengikuti asas kebebasan berkontrak, oleh karena itu disebut juga menganut sistem terbuka. Hal ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

c. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- 3) Mengenai suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

d. Obyek dan Subyek Perjanjian

1) Obyek Perjanjian

Seorang kreditor berhak atas suatu prestasi yang diperjanjikan, dan debitur melaksanakan prestasi, dengan demikian hakikatnya dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan

prestasi. Prestasi merupakan obyek dari suatu perikatan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, wujud prestasinya ialah :

- a) memberikan sesuatu,
- b) berbuat sesuatu,
- c) tidak berbuat sesuatu.

2) Subyek Perjanjian

Perjanjian timbul karena hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Salah satu pihak menjadi pembiayaan konsumenur sedangkan pihak lain menjadi debitur. Pembiayaan konsumenur dan debitur adalah pihak yang menjadi subyek perjanjian. Pembiayaan konsumenur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi.

e. Wanprestasi

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.

Wanprestasi dapat berupa empat macam : ³

- 1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Hukuman atau akibat-akibat bagi si berhutang yang lalai ada empat macam yaitu: ⁴

- 1) membayar kerugian yang diderita oleh si pemberi hutang atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;

³ *Loc.cit.*

⁴ *Loc.cit.*

- 2) pembatalan perjanjian atau dinamakan pemecahan perjanjian;
- 3) peralihan resiko;
- 4) membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

f. Pengertian Pembiayaan konsumen

Lembaga pembiayaan konsumen adalah salah satu bentuk usaha, dibidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan.

g. Berakhirnya Perjanjian Pembiayaan konsumen

Berakhirnya perjanjian pembiayaan konsumen pada prinsipnya adalah sama dengan berakhirnya perjanjian-perjanjian pada umumnya, yaitu ditentukan apabila sudah dipenuhinya kewajiban debitur untuk melunasi hutang atau pembiayaan konsumennya tersebut.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*, yaitu artinya bersifat 'nyata'. Maka pendekatan empiris dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-

⁵ Hilman Hadikusuma, *Metodelogi Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 1995), hal 61.

teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen.⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data tersebut merupakan keterangan yang diperoleh dari sumber data secara langsung sehingga dapat memberikan keterangan yang jelas dan nyata.

Adapun teknik pengumpulan data primer yang penulis gunakan yaitu dengan cara melaksanakan wawancara bebas terpimpin. Dalam wawancara ini penulis mengumpulkan data yang relevan terhadap maksud-maksud dari penelitian yang telah direncanakan dengan jalan tanya jawab kepada responden. Responden dalam wawancara ini adalah staf ataupun pegawai dari PT. Andalan Finance Indonesia Semarang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan dan wawancara.⁷

4. Lokasi penelitian dan responden

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengadakan penelitian pada PT. Adalan Finance Indonesia Semarang, jalan Jenderal Sudirman No. 289. Semarang. Adapun yang menjadi responden penelitian ini adalah:

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : PT. Ghalia Indonesian, 1980), hal. 97.

⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), hal. 59.

- a. general manager ;
- b. *Credit Analyst*, dan
- c. konsumen.

5. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan akan menempuh dua tahapan yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang bersifat sekunder. Data yang bersifat sekunder tersebut dibagi menjadi dua yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini adalah bahan hukum dasar yang bersifat mengikat. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah penjelas bagi bahan hukum primer yang tertuang dalam bentuk Undang-Undang dan buku-buku.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yang dilakukan adalah untuk memperoleh data primer yang akan mendukung data-data sekunder sehingga dapat dilakukan suatu analisis/penelitian. Penelitian lapangan akan dilakukan pada lembaga dan instansi terkait. Penulisan hukum ini berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan konsumen mobil (roda empat) pada PT. Andalan Finance Indonesia Semarang", maka sesuai dengan substansi penulisan hukum ini akan dilakukan penelitian di Kantor PT. Andalan Finance Semarang Indonesia.

6. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode *analisis kualitatif*, yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis dan mendeskripsikan hasil penelitian yaitu tentang tinjauan hukum pelaksanaan pembiayaan konsumen mobil (roda empat) pada PT. Andalan Finance Indonesia Semarang.

7. Pengolahan Data

Data-data yang bersifat primer dan sekunder pada awalnya adalah suatu data-data yang masih mentah. Data-data ini akan diolah melalui suatu proses yaitu proses *editing*. *Editing* adalah suatu proses pengolahan data dengan cara memilih data-data yang dianggap penting saja yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Sehingga data-data yang tidak diperlukan atau kurang penting akan disisihkan terlebih dahulu dan akan digunakan bila suatu saat diperlukan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah secara garis besar dari uraian tesis ini serta untuk mempermudah penyusunan tesis ini, penulis mempergunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang yang akan menjelaskan alasan pemilihan judul penulisan hukum. Bab ini juga memaparkan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, serta tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penulisan hukum ini yang semuanya akan ditulis secara sistematis. Oleh karena itu dibuatlah suatu sistematika penulisan agar penulisan hukum ini tetap dapat berjalan sesuai dengan alurnya dan tepat sasaran.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai kompilasi berbagai teori yang akan dijadikan dasar dalam melakukan penelitian dan analisis hasil penelitian yang akan diperoleh nanti. Penentuan teori tersebut berdasarkan pada variabel yang ada dalam judul penulisan hukum sehingga bab ini akan menjadi bahan referensi dalam menyusun

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan menguraikan antara lain sebagai berikut :

- a. Pengertian Perjanjian
- b. Asas-asas Perjanjian
- c. Syarat Sahnya Perjanjian
- d. Obyek dan Subyek Perjanjian
- e. Wanprestasi
- f. Pengertian pembiayaan konsumen
- g. Berakhirnya perjanjian pembiayaan konsumen

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian di lapangan dan pembahasan yang menghubungkan fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dan atau penelitian lapangan tentang “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan konsumen pada PT. Andalan Finance Indonesia Semarang”. Penelitian akan dimulai dengan meneliti berjalan nya suatu perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Andalan Finance Indonesia. Kemudian akan meneliti mengenai upaya seseorang atau pemohon pembiayaan konsumen dan adakah hambatan-hambatan dalam melaksanakannya. Apabila terdapat hambatan-hambatan maka bagaimanakah upaya PT. Andalan Finance Indonesia Semarang untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Sesuai dengan judul penulisan hukum, maka akan dilakukan penelitian di kantor PT. Andalan Finance Indonesia Semarang Pada kantor ini akan dimintai keterangan mengenai perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh pemohon dengan PT. Andalan Finance Indonesia Semarang. Setelah mendapatkan semua data-data yang diperlukan maka data-data tersebut akan diolah dan diuraikan secara sistematis dalam bab ini.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang dapat ditarik yang mengacu pada hasil penelitian sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditetapkan dan saran-saran yang akan lahir setelah pelaksanaan penelitian dan pengulasannya dalam tesis.

Selanjutnya akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan tesis ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan definisi mengenai persetujuan sebagai berikut : “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Para sarjana hukum perdata umumnya berpendapat bahwa definisi atau rumusan perjanjian yang terdapat didalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas. Untuk dapat mencerminkan apa yang dimaksud perjanjian Rutten dalam Purwahid Patrik merumuskan sebagai berikut⁸ : “Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditunjukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak

⁸ Purwahid Patrik, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, (Semarang : Seksi Hukum Perdata FH UNDIP, 1996), hal. 47-49.

atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik”.

Perjanjian berasal dari istilah belanda yaitu “*overeenkomst*” menurut J. Satrio perjanjian adalah suatu perbuatan atau tindakan hukum seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih kedua belah pihak saling mengikat diri.⁹

R. Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lainnya atau kedua orang itu saling berjanji untuk saling melaksanakan suatu hal.¹⁰

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹¹ Wirjono Projodikoro, memberikan pengertian bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta dan benda antara kedua belah pihak dalam mana satu pihak berjanji untuk melaksanakan suatu hal, sedang pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹²

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang

⁹ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 20.
¹⁰ R. Subekti, *Hukum perjanjian*, (Jakarta, Cetakan ke XII, Intermasa, 1987), hal. 1.
¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Edisi kelima, Liberty, 1998), hal. 4.
¹² Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan tertentu*, (Bandung, Sumber, 1979), Hal. 7.

pokok dalam dunia usaha dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti pemerian kredit, asuransi, dan jual beli barang.¹³

Selanjutnya untuk adanya suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan secara tertulis dan perjanjian yang dilakukan secara lisan, kedua bentuk perjanjian tersebut sama kekuatannya dalam arti sama kedudukannya untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak. Hanya saja perjanjian secara tertulis dapat dengan mudah dipakai sebagai alat bukti bila sampai terjadi persengketaan.¹⁴

2. Asas-Asas Perjanjian

a. Asas Kepribadian (personality)

Asas kepribadian ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja, hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1315 menegaskan : "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 Kitab

¹³ R. Subekti, *Op.cit.*, hal. 1.

¹⁴ *Loc.cit.*

Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

b. Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul, tidak diperlukan suatu formalitas dan dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu cukup secara lisan saja. Pada umumnya perjanjian itu adalah sah dalam arti sudah mengikat, apabila sudah tercapai suatu kesepakatan yang pokok dalam perjanjian. Berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau suatu pengertian bahwa untuk membuat suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk.

Sesuai dengan artinya konsensualitas adalah kesepakatan, maka asas ini menetapkan bahwa terjadinya suatu perjanjian setelah terjadi suatu kata sepakat dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, dengan kesepakatan

maka perjanjian menjadi sah dan mengikat kepada para pihak dan berlaku bagi undang-undang bagi mereka.¹⁵

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah diatur dalam undang-undang ataupun belum diatur dalam undang-undang. Karena hukum perjanjian mengikuti asas kebebasan berkontrak, oleh karena itu disebut juga menganut sistem terbuka. Hal ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Sedangkan menurut Sutan Remi Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak dalam perkembangannya ternyata dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki *bergaining power* yang seimbang dalam kenyataannya tersebut sering tidak terjadi demikian sehingga negara menganggap perlu untuk campur tangan melindungi pihak yang lemah.¹⁶

¹⁵ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2009), hal. 164

¹⁶ Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta, 1995), hal. 17

Asas ini menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa saja dan macam apa saja, perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi, asalkan perjanjian nya tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.¹⁷

d. Asas itikad baik

Asas itikad baik dapat di bedakan antara itikad baik yang *subjektif* dan itikad baik yang *objektif*. Itikad baik yang *subjektif* dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, sedangkan itikad baik dalam pengertian objektif maksudnya bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat.

Istilah itikad baik dalam pelaksanaan suatu perjanjian terdapat didalam ketentuan Pasal 1338 ayat 3 KitabUndang-Undang Perdata yang berbunyi :

“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Jadi dalam perikatan yang dilahirkan dari perjanjian, para pihak bukan hanya terikat oleh kata-kata perjanjian itu dan oelh kata

¹⁷ Gatot Supramono, *op.cit.*, hal. 164

ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai perjanjian itu, melainkan juga itikad baik.

Asas yang dikutip oleh Purwahid Patrik menyatakan bahwa *bona fides* adalah merupakan kerangka *yuridis* dari kepatutan selanjutnya ia mengatakan bahwa kekacauan terjadi karena kepatutan *in abstracto* menurut sifat nya adalah sesuatu yang *objektif*, sedangkan *bona fides* (itikad baik) dalam arti yang sebenarnya terletak pada jiwa manusia.¹⁸

Asas itikad baik tidak hanya ada pada waktu pelaksanaan perjanjian, akan tetapi pada waktu membuat perjanjian juga dilandasi dengan itikad baik, sehingga itikad baik antara pada waktu membuat membuat perjanjian dengan pelaksanaan menjadi sinkron.¹⁹

e. Asas kepercayaan (*vertrouwensbeginesl*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, membutuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak, dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikat dirinya dan untuk

¹⁸ Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Keputusan dalam perjanjian*, (Semarang badan Penerbit UNDIP, 1996), hal. 49.

¹⁹ Gatot Supramono, *op.cit.*, hal. 165.

keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.²⁰

Dalam asas ini para pihak yang melakukan perjanjian masing-masing harus saling percaya satu sama lain, kepercayaan itu menyangkut saling memenuhi kewajibannya seperti yang diperjanjikan.²¹

f. Asas kepatutan

Suatu perjanjian dibuat bukan hanya semata-mata memperhatikan ketentuan undang-undang, akan tetapi kedua belah pihak harus memperhatikan pula tentang kebiasaan, kesopanan, dan kepantasan yang berlaku dimasyarakat sehingga perjanjian itu dibuat secara patut, dan melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.²²

g. Asas kekuatan mengikat

Suatu perjanjian terkandung asas kekuatan mengikat, terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung, Alumni, 1983), hal 113-114

²¹ Gatot Supramono, *op.cit.*, hal. 165.

²² *Loc.cit.*

kebiasaan dan kepatutan serta moral, yang mengikat para pihak.²³

h. Asas persamaan hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk saling menghormati satu sama lain.²⁴

i. Asas keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah dibuat. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan, kreditor mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut perluasan prestasi melalui kekayaan debitor, namun kreditor memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditor yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditor dan debitor seimbang.²⁵

j. Asas keadilan

Asas keadilan lebih tertuju pada isi dari perjanjian bahwa ini perjanjian harus mencerminkan adanya keadilan pada kedua belah pihak yang berjanji, isi perjanjian harus seimbang

²³ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hal. 114.

²⁴ *Loc.cit.*

²⁵ *Loc.cit.*

antara hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan tidak ada perbuatan penekanan fisik maupun psikis sewaktu membuat perjanjian.²⁶

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya

Adanya kata sepakat, berarti bahwa subjek (kreditur dan debitor) yang mengadakan perjanjian itu dengan kesepakatan, yaitu setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal pokok dari isi perjanjian itu. Artinya apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Untuk mengetahui kapan terjadinya kata sepakat ternyata kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengaturnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan terdapat sejumlah teori, yaitu²⁷ :

²⁶ Gatot Supramono, *op.cit.*, hal. 165.
²⁷ *Ibid*, hal. 166.

1) Teori kehendak (*wilstheorie*)

Dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi manakala para pihak menyatakan kehendaknya untuk mengadakan suatu perjanjian, mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat.

2) Teori kepercayaan (*vetrouwenstheorie*)

Berdasarkan teori kepercayaan, kata sepakat dalam suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada saat pernyataan salah satu pihak dapat dipercaya secara objektif oleh pihak lainnya. Pada umumnya pernyataan yang dipercaya berasal dari pihak debitor setelah kreditor mengetahui sua informasih yang berhubungan dengan debitor.

3) Teori ucapan (*uitinggstheorie*)

Menurut teori ini landasan kata sepakat didasarkan pada ucapan atau jawaban pihak debitor. Kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitor mengucapkan persetujuan terhadap penawaran yang dilakukan oelh debitor. Apabila jawaban dilakukan dengan tulisan atau surat maka kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat menulis surat jawaban.

4) Teori pengiriman (*verzendingstheorie*)

Dalam teori pengiriman , kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitor mengirimnya dilakukan melalui pos, maka kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat surat jawaban itu diberi cap atau distempel oleh kantor pos.

5) Teori penerimaan (*onvangstheorie*)

Menurut teori penerimaan, kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat kreditor menerima surat jawaban atau menerima jawaban lisan melalui telepon dari debitor.

6) Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat kreditor mengetahui bahwa debitor telah menyatakan menerima penawarannya. Tteori pengetahuan tampak lebih luas dari teori penerimaan karena dalam teori pengetahuan memandang kreditor mengetahui baik secara lisan maupun tulisan.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Seseorang yang dapat membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Hakikatnya setiap orang yang sudah dewasa (sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah walaupun belum mencapai umur 21 tahun) dan sehat akal adalah cakap menurut hukum. Aspek keadilan dilihat dari orang yang membuat perjanjian dan nantinya akan terikat oleh

perjanjian itu harus mempunyai cukup kemampuan untuk menyadari benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya atas perbuatannya itu.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian atau objek perjanjian serta prestasi yang wajib dipenuhi, kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian itu dimaksudkan untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Jika pokok perjanjian, objek perjanjian dan prestasi itu tidak dilaksanakan maka perjanjian itu batal.

Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat ketiga ini berakibat batal demi hukum, oleh karena itu perjanjian dianggap tidak pernah ada.

d. Suatu sebab yang halal

Sebab adalah sesuatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian atau yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan dengan causa yang halal menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang untuk membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak.

Undang-Undang tidak mempedulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang menjadi perhatian dan yang diawasi oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak.

Menurut Abdulkadir Muhammad, akibat hukum perjanjian yang berisi tidak halal adalah batal (*nietig, void*). Tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian di muka hakim, karena sejak semula dianggap tidak ada perjanjian. Apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa causa (sebab) maka ia dianggap tidak pernah ada (Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).²⁸

Semua perjanjian yang tidak memenuhi sebab yang halal akibatnya perjanjian batal demi hukum, untuk dapat menyatakan demikian diperlukan formalitas tertentu, yaitu dengan putusan pengadilan, hal ini menyangkut kepercayaan, karena perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan berakibat semua orang menjadi percaya pada putusan tersebut.²⁹

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Cetakan ke III*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 227.

²⁹ Gatot Supramono, *op.cit.*, hal. 171.

4. Objek dan Subjek Perjanjian

a. Objek perjanjian

Seorang kreditor berhak atas suatu prestasi yang diperjanjikan, dan debitor melaksanakan prestasi, dengan demikian hakikatnya dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan prestasi. Prestasi merupakan objek dari suatu perikatan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, wujud prestasinya ialah :

- 1) memberikan sesuatu,
- 2) berbuat sesuatu,
- 3) tidak berbuat sesuatu.

Tentang objek/prestasi perjanjian harus dapat ditentukan adalah suatu yang logis dan praktis, takkan ada ari perjanjian jika undang-undang tidak menentukan hal demikian.³⁰ Maka Pasal 1320 ayat (3) menentukan, bahwa objek/prestasi perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu objeknya harus tertentu (*een bepaalde onderwerp*). Sekurang-kurangnya objek itu mempunyai “jenis” tertentu seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Objek atau jenis objek merupakan persyaratan dalam mengikat perjanjian, dengan sendirinya perjanjian demikian “tidak sah” jika seluruh objek/*voorwerp*-nya tidak tertentu.

³⁰

Yahya harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung, Alumni, 1986), hal. 10

b. Subjek Perjanjian

Kreditor dan debitor itulah yang menjadi subjek perjanjian. Kreditor mempunyai hak atas prestasi dan debitor wajib memenuhi pelaksanaan prestasi. Sesuai dengan teori dan praktek hukum, kreditor terdiri dari :

- 1) Individu sebagai *persoon* yang bersangkutan : *natuurlijke persoon* atau manusia tertentu, *rechts persoon* atau badan hukum.
- 2) Seseorang atas keadaan tertentu mempergunakan kedudukan/hak orang lain tertentu : seorang *bezitter* atas kapal.
- 3) *Beziteer* dapat bertindak sebagai kreditor dalam suatu perjanjian. Kedudukan nya sebagai subjek kreditor bukan atas nama pemilik kapal *inpersoon*.
- 4) *Persoon* yang dapat diganti.

Mengenai *persoon* kreditor yang “dapat diganti” atau *vervangbaar*, berarti kreditor yang menjadi subjek pemula, telah ditetapkan dalam perjanjian; sewaktu-waktu dapat diganti kedudukannya dengan kreditor baru. Perjanjian yang dapat diganti ini dapat dijumpai dalam bentuk perjanjian “*aan order*” atau perjanjian atas order/atas perintah. Demikian jugadalam perjanjian “*aan tooder*” perjanjian “atas nama”

atau “kepada pemegang/pembawa” pada surat-surat tagihan hutang (*schuldvordering papier*).³¹

Tentang siapa yang menjadi debitor, sama keadaannya dengan orang-orang yang dapat menjadi kreditor :

- 1) Individu sebagai *persoon* yang bersangkutan : *natuurlijke persoon* atau manusia tertentu, *rechts persoon* atau badan hukum.
- 2) Seseorang atas kedudukan/keadaan tertentu bertindak atas orang tertentu.
- 3) Seseorang yang dapat diganti menggantikan kedudukan debitor semula, baik atas dasar bentuk perjanjian maupun izin persetujuan debitor.

5. Unsur-Unsur Hukum Perjanjian

Kesepakatan antara pihak pertama dan pihak kedua memenuhi aspek-aspek hukum perjanjian, karena terdapat unsur-unsur sebagai berikut : ³²

a. *Essentialia*

Unsur yang sangat esensi/penting dalam suatu perjanjian yang harus ada.

bagian ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta

³¹

Ibid, hal. 16.

³²

Mariam darus Badruzaman, Op.cit., hal. 99.

(*constructive oordeel*). seperti persetujuan antara para pihak da objek perjanjian.

b. Naturalia

Unsur perjanjian yang sewajarnya ada jika tidak dikesampingkan oleh kedua belah pihak menurut Pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum perdata dalam perjanjian jual beli barang, penjual wajib menjamin cacat yang tersembunyi. merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian secara diam-diam melekat pada perjanjian.

c. Accidentalialia,

Unsur perjanjian yang ada jika dikendaki oleh kedua belah pihak. Sebagai kelengkapan Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dikeluarkan oleh pihak pertama, maka pihak pertama juga membuat kesepakatan lain dengan pihak kedua berupa Surat Penyerahan Jaminan Secara Fidusia. bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak.

6. Jenis-Jenis Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, ada beberapa cara untuk mengadakan perbedaan jenis-jenis perjanjian menurut H. Salim HS, perjanjian dapat dibedakan menjadi³³ :

³³ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 154.

- a. Perjanjian timbal-balik, timbal balik tidak sempurna dan sepihak.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana kedua belah pihak timbul kewajiban pokok, seperti jual beli, sewa menyewa, penjual harus menyerahkan barang yang dijual sedangkan pembeli membayar harga dari barang itu, yang menyewakan berkewajiban memberikan kenikmatan dari barang yang disewakan, penyewa membayar harga sewanya. Prestasi kedua belah pihak kira-kira adalah seimbang.

Perjanjian timbal balik tidak sempurna (perjanjian dua pihak secara kebetulan) dimana salah satu pihak timbul prestasi pokok sedangkan pihak lain ada kemungkinan untuk kewajiban sesuatu tanpa dikatakan dengan pasti bahwa kedua prestasi itu adalah seimbang. Dalam perjanjian sepihak hanya salah satu saja yang mempunyai kewajiban pokok.

- b. Perjanjian cuma-cuma dengan alasan hak yang membebani.

Perjanjian dengan alasan hak yang membebani adalah perjanjian dimana prestasi dari pihak yang satu selalu ada kontraprestasi dari pihak yang lain, kedua prestasi itu adalah saling berhubungan. Kontraprestasinya dapat berupa suatu kewajiban dari pihak lainnya, tetapi juga pemenuhan suatu syarat yang potestatif.³⁴

³⁴ Sri sudewi sofwan, *Hukum Perutang Bagian II*, (jakarta, seksi Hukum perdata UGM, 1980), hal. 4

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian dimana menurut hukum salah satu pihak saja yang menerima keuntungan.

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk menyerahkan hak milik (*hak eigendom*) dalam perjanjian jual beli. Perjanjian ini sebagai perjanjian *obligatoir*.

Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadinya perjanjian timbul hak dan kewajiban pihak-pihak³⁵, perjanjian *obligatoir* mengikat untuk menyerahkan suatu barang sedangkan pada perjanjian kebendaan adanya penyerahan benda kepada pemiliknya.

c. Perjanjian *konsensuil* dan *riil*

Perjanjian *konsensuil* adalah perjanjian yang berdasarkan kesepakatan atau persesuaian kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian *riil* adalah perjanjian yang terjadi tidak hanya berdasarkan persesuaian kehendak saja tetapi ada penyerahan nyata, kecuali yang telah diatur dalam undang-undang.

7. Wanprestasi

Prestasi diartikan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian atau hal-hal yang telah disepakati

³⁵

Abdulkadir muhamad, *Hukum Perikatan*, (Bandung, Alumni 1990), hal 87

bersama, oleh pihak yang telah mengikatkan diri itu. Sedangkan pelaksanaan prestasi disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan.³⁶

Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa prestasi dapat berupa :

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Suatu perjanjian dapat dikatakan dilaksanakan dengan baik apabila para pihak telah memenuhi syarat yang telah diperjanjikan. Walaupun demikian pada kenyataannya sering dijumpai bahwa pelaksanaan dari suatu perjanjian tidak dapat berjalan dengan baik karena salah satu pihak wanprestasi.

Dalam hukum perdata adanya kelalaian atau kealpaan si berhutang yang wajib melakukan sesuatu atau tidak memenuhi menepati kewajibannya yang telah diperjanjikan lazim dikatakan sebagai wanprestasi, yang sekarang ini lebih dikenal dengan istilah ingkar janji.

Menurut Munir Fuady, yang dimaksud wanprestasi adalah³⁷ “tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak kepada pihak-pihak

³⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung, Alumni, 1980), hal. 29.

³⁷ Munir fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 40.

tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan”.

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang yang berhutang disebutkan dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”. Memang hampir serupa *onrechtmatige daad* dengan wanprestasi. Itu sebabnya dapat dikatakan wanprestasi adalah juga merupakan “genus spesifik” dari *onrechtmatige daad* seperti yang dirumuskan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁸

Apabila si berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.³⁹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengaturan mengenai wanprestasi diantaranya terdapat dalam Pasal 1238 (pernyataan lalai bagi si berhutang dengan surat perintah), 1247-1248 (penggantian ganti rugi bagi si berhutang yang wanprestasi), 1266

³⁸ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 60.

³⁹ R. Subekti, *op.cit.*, hal. 45.

(pembatalan perjanjian), 1267 (macam-macam tuntutan yang dapat diajukan pada si berhutang yang lalai), 1460 (peralihan resiko).

Wanprestasi dapat berupa empat macam : ⁴⁰

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Hukuman atau akibat-akibat bagi si berhutang yang lalai ada empat macam yaitu: ⁴¹

- a. membayar kerugian yang diderita oleh si pemberi hutang atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
- b. pembatalan perjanjian atau dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. peralihan resiko;
- d. membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

B. Tinjauan Tentang Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen dalam bahasa inggris disebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen ini pada

⁴⁰ *Loc.cit.*

⁴¹ *Loc.cit.*

hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen biaya diberikan oleh Bank.⁴² Adapun yang di maksud dengan pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Menurut Pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang lembaga Pembiayaan : “Pembiayaan konsumen adalah pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.”

Oleh karena yang dibiayai itu adalah barang untuk tujuan *konsumtif*, sudah tentu mengandung resiko tersebut menyebar pada banyak konsumen dengan pembiayaan yang relatif kecil dan *rate of interest* yang relatif tinggi. Bagi perusahaan pembiayaan,

⁴² Munir fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999), hal 162.

keadaan ini masih aman kendatipun jaminan (*security*) dari pihak konsumen masih diperlukan⁴³

Berdasarkan definisi diatas, Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati telah memerinci unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen sebagai berikut:

- a. Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan konsumen (kreditor), konsumen (debitor) dan penyedia barang (supplier).
- b. Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga.
- c. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen. Perjanjian ini didukung oleh dokumen-dokumen.
- d. Hubungan antara hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok, konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.

⁴³ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 246.

- e. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, pokok, tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitor). Jaminan pokok secara *fidusia* berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan hutang (*promissory notes*) dari konsumen.⁴⁴

Selanjutnya, berdasarkan definisi beserta unsur-unsur sebagaimana diuraikan diatas, dapat diidentifikasi karakteristik dari pembiayaan konsumen serta berbedaannya dengan kegiatan sewa guna usaha, khususnya dalam bentuk *financial lease*. Karakteristik dari pembiayaan konsumen, yaitu sebagai berikut:

- a. Sasaran pembiayaan jelas, yaitu konsumen yang membutuhkan barang-barang konsumsi.
- b. Objek pembiayaan berupa barang-barang kebutuhan atau konsumsi konsumen.
- c. Besarnya pembiayaan yang di berikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen pada masing-masing konsumen relatif kecil, sehingga:
- d. Resiko pembiayaan relatif lebih aman karena pembiayaan tersebar pada banyak konsumen.

- e. Pembayaran kembali oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara berkala/angsuran.

2. Perbedaan Pembiayaan Konsumen dengan Sewa Guna Usaha

Adapun perbedaan pembiayaan konsumen dengan sewa guna usaha, khususnya yang dengan hak *opsi (finance lease)* adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan konsumen, kepemilikan barang/objek pembiayaan berada pada konsumen yang kemudian diserahkan secara *fidusia* kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Adapun pada sewa guna usaha, pemilik barang/objek pembiayaan berada pada *lessor*.
- b. Pembiayaan konsumen, tidak ada batasan waktu pembiayaan dalam arti disesuaikan dengan umur ekonomis barang/objek pembiayaan. Adapun pada sewa guna usaha jangka waktu diatur sesuai dengan umur ekonomis barang/objek modal yang di biayai oleh *lessor*.
- c. Pembiayaan konsumen tidak membatasi pembiayaan kepada calon konsumen yang telah mempunyai NPWP, mempunyai kegiatan usaha dan/ atau pekerjaan bebas. Adapun pada sewa guna usaha calon *lessee* diharuskan ada atau memiliki syarat-syarat diatas.

- d. Perlakuan perpajakan antara pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha berbeda, baik dilihat dari sisi perusahaan pembiayaan maupun dilihat dari sisi konsumen atau *lessee*.
- e. Pembiayaan konsumen, kegiatan dalam bentuk *sale and lease back* belum diatur. Adapun pada sewa guna usaha hal tersebut dimungkinkan terjadinya.

Pelaksanaan kegiatan pembiayaan konsumen sehari-hari, sama dengan kegiatan pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*) dengan hak opsi untuk perorangan, sehingga dalam prakteknya produk pembiayaan konsumen dijadikan pengganti sewa guna usaha (*leasing*) dengan hak opsi. Sedangkan transaksi pembiayaan konsumen yang bisa dilakukan oleh perusahaan pembiayaan adalah seperti *direct finance lease*, dimana dalam transaksi ini debitor belum pernah memiliki barang kebutuhan konsumen yang akan menjadi objek pembiayaan konsumen. Dengan demikian kreditor atas nama debitor akan membeli barang kebutuhan konsumen tersebut secara langsung kepada supplier/dealer/developer dengan menggunakan nama debitor sebagai pemilik.

Terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi dan merupakan dasar dari kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu :

- a. Pembiayaan konsumen adalah merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.

- b. Objek pembiayaan usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang kebutuhan konsumen, biasanya kendaraan bermotor, alat kebutuhan rumah tangga, komputer, barang-barang elektronika dan lain sebagainya.
- c. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya dilakukan secara bulanan dan ditagih langsung kepada konsumen.
- d. Jangka waktu pengembalian, bersifat fleksibel tidak terikat dengan ketentuan seperti *financial lease*.⁴⁵

3. Pihak-Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen

a. Perusahaan pembiayaan konsumen

Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Perusahaan tersebut menyediakan jasa kepada konsumen dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok (*supplier*). Antara perusahaan dan konsumen harus ada terlebih dulu kontrak pembiayaan konsumen yang sifatnya pemberian kredit. Dalam kontrak tersebut perusahaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai harga barang

⁴⁵

Budi Rachmat, *Multi Finance Sewa Guna Usaha Ajak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, (Jakarta, CV Novindo Pustaka Mandiri, 2002), hal 137.

yang dibelinya dari pemasok, sedangkan pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan tersebut.⁴⁶

Kewajiban pihak-pihak dilaksanakan berdasarkan kontrak pembiayaan konsumen. Sejumlah uang dibayarkan tunai kepada pemasok untuk kepentingan konsumen, sedangkan pemasok menyerahkan barang kepada konsumen. Dengan penyerahan tersebut barang yang bersangkutan menjadi milik konsumen. Pihak konsumen wajib membayar secara angsuran sampai lunas kepada perusahaan sesuai dengan kontrak. Selama angsuran belum dibayar lunas, maka barang milik konsumen tersebut menjadi jaminan hutang secara fidusia.

b. Konsumen

Konsumen adalah pihak pembeli barang dari pemasok atas pembayaran oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Konsumen tersebut dapat berstatus berorangan (*individual*) dapat pula perusahaan bukan badan hukum. Dalam hal ini ada 2 (dua) hubungan kontraktual, yaitu :

- 1) Perjanjian pembiayaan yang bersifat kredit antara perusahaan dan konsumen;

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *op.cit.*, hal. 248.

2) Perjanjian jual beli antara pemasok dan konsumen yang bersifat tunai.

Pihak konsumen umumnya masyarakat karyawan, buruh tani yang berpenghasilan menengah ke bawah yang belum tentu mampu membeli barang kebutuhannya itu secara tunai. Dalam pemberian kredit, resiko menunggak angsuran oleh konsumen merupakan hal yang biasa terjadi. Oleh karena ini, pihak perusahaan dalam memberikan kredit kepada konsumen masih memerlukan jaminan terutama jaminan fidusia atas barang yang dibeli itu, disamping pengakuan hutang (*promissory notes*) dari pihak konsumen.

Dalam perjanjian jual beli antara pemasok dan konsumen, pihak pemasok menetapkan syarat bawa harga akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Apabila karena alasan apapun, perusahaan tersebut melakukan wanprestasi, yaitu tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak, maka jual beli barang antara pemasok dan konsumen akan dibatalkan. Dalam perjanjian jual beli, pihak pemasok menjamin barang dalam keadaan baik, tidak ada cacat tersembunyi, pelayanan purna jual (*after sale service*).

c. Pemasok

Pemasok adalah pihak penjual barang kepada konsumen atas pembayaran oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembayaran konsumen. Hubungan kontraktual antara pihak pemasok dan konsumen adalah jual beli bersyarat. Syarat yang dimaksud adalah pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Antara pihak pemasok dan konsumen terdapat hubungan kontraktual, di mana pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen dan konsumen wajib membayar harga barang secara angsuran kepada perusahaan yang telah melunasi harga barang secara tunai.

Antara pihak ketiga (perusahaan pembiayaan konsumen) dan pemasok tidak ada hubungan kontraktual, kecuali sebagai pihak ketiga yang disyaratkan. Oleh karena itu, apabila pihak ketiga melakukan wanprestasi, padahal kontrak jual beli dan kontrak pembiayaan konsumen telah selesaidilaksanakan, maka jual beli bersyarat tersebut dapat dibatalkan oleh pemasok dan pihak konsumen dapat menggugat pihak ketiga yaitu perusahaan pembiayaan konsumen berdasarkan wanprestasi.

C. Tinjauan Tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen

1. Bentuk dan Isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Di dalam praktek perjanjian konsumen umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau disebut juga perjanjian standar (*standard contract, standard agreement*).

Menurut Purwahid Patrik perjanjian baku adalah “suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak”.⁴⁷

Selanjutnya J. Satrio merumuskan perjanjian standar sebagai “perjanjian tertulis, yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu, yang mengandung syarat-syarat baku, yang oleh salah satu pihak kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui”.⁴⁸

Ciri dari perjanjian standar adalah adanya sifat *uniform* atau keseragaman dari syarat-syarat perjanjian untuk semua perjanjian untuk sifat yang sama. Syarat-syarat baku dalam perjanjian adalah syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dimuat, yang jumlahnya tidak tertentu, tanpa merundingkan lebih dahulu isinya⁴⁹

⁴⁷ Purwahid Patrik, *Peranan Perjanjian Baku dalam Masyarakat*, (makalah dalam seminar masalah standar kontrak dalam perjanjian Kredit, Surabaya, 11 desember 1993), hal. 1.

⁴⁸ J. Satrio, *Beberapa Segi Hukum Standarisasi Perjanjian Kredit*, (Seminar Masalah standar kontrak dalam Perjanjian Kredit, Surabaya : 11 Desember 1993) hal 1

⁴⁹ Purwahid Patrik, *op.cit.*, hal. 2.

Dalam perjanjian standar ada kalanya konsumen bertemu dengan klausula, membebaskan diri atau membatasi diri dari tanggungjawab yang timbul sebagai akibat peristiwa tertentu, yang sebenarnya menurut hukum menjadi tanggungannya. Klausula pembebanan seperti disebut klausula *eksenoratie*".⁵⁰

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen istilah syarat eksonerasi dipake dengan istilah klausula baku

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku, yaitu:

- a. Bahwa para pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang dibutuhkan untuk diperdagangkan dilarang untuk mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian dimana klausula baku tersebut mempunyai akibat.
- b. Isi dari perjanjian tentunya dibuat secara baku.

2. Jaminan Pada Pembiayaan Konsumen

Mengingat bahwa perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian kredit yang melibatkan sejumlah uang dan kemungkinan terjadinya kelalaian oleh pihak konsumen, maka untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pembayaran angsuran

serta mencegah timbulnya kerugian bagi perusahaan pembiayaan, maka perlu adanya jaminan.

Jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen ini pada prinsipnya serupa dengan jaminan terhadap perjanjian kredit bank biasa, khususnya kredit bank konsumsi, jaminan dalam perjanjian dibagi dalam tiga kelompok yaitu :

a. Jaminan utama

Sebagai suatu kredit, maka jaminan utamanya adalah kepercayaan dari kreditor kepada konsumen bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya. Di sisi prinsip pemberian kredit berlaku, yaitu : prinsip 5C (*Collateral, Capacity, Character, Capital dan Condition of economy*)

b. Jaminan pokok

Sebagai jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan konsumen adalah barang yang dibeli dengan dana tersebut. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *Fiduciary Transfer of Ownership* (fidusia). Karena adanya fidusia ini, maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak pemberi biaya hingga kredit lunas.

c. Jaminan tambahan

Di samping itu sering juga diminta jaminan terhadap transaksi pembiayaan konsumen ini, biasanya jaminan tambahan tersebut berupa pengakuan hutang (*promissory notes*), kuasa menjual barang (*cessie*) dan dari asuransi, juga jaminan berupa persetujuan istri/suami untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris/RUPS untuk konsumen perusahaan, sesuai ketentuan anggaran dasarnya.

3. Jaminan Fidusia

a. Pengertian jaminan fidusia

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Sebelum Undang-Undang ini dibentuk, lembaga ini disebut dengan bermacam-macam nama . Zaman romawi menyebutnya "*fiducia cum creditor*", Asser Van Oven menyebutnya "*zekerheinds eigendom*" (hak milik sebagai jaminan), Blom menyebutnya "*bezitloos zekerheidsrecht*" (hak jaminan tanpa penguasaan), kahrel memberi nama "*Verruimd Pandbegrip*" (pengertian gadai yang diperluas), A Veenhoveb menyebutnya "*eigendoms overdracht tot zekerheid*"

(penyerahan hak milik sebagai jaminan) sebagai singkatan dapat dipergunakan istilah “fidusia” saja.⁵¹

Fidusia dalam bahasa inonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO), sedangkan dalam bahasa inggrisnya secara lengkap sering disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownersip*.⁵²

Sedangkan pengertian fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJF adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bagwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berdasarkan Pasal terseut fidusia dirumuskan secara umum, yang belum dihubungkan atau dikaitkan dengan suatu perjanjian pokok jadi belum dikaitkan dengan hutang.

Adapun unsur-unsur perumusan fidusia adalah sebagai berikut :⁵³

- 1) Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia.

Unsur kepercayaan memang memegang peran penting dalam fidusia dan hal ini juga tampak dari penyebutan

⁵¹ Mariam Darus Badrudzaman, *Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia* (Bandung Citra aditya Bakti, 1991, hal.90

⁵² Munir Fuady, *Jaminan Fidusia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 3

⁵³ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 160-175.

unsur tersebut didalam UUJF arti kepercayaan selama ini diberikan oleh praktek, yaitu :

- a) Debitor pemberi jaminan percaya bahwa benda fidusia yang diserahkan olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditor penerima jaminan tetapi hanya sebagai jaminan saja;
 - b) Debitor pemberi jaminan percaya bahwa kreditor terhadap benda jaminan hanya akan menggunakan kewenangan yang diperolehnya sekedar untuk melindungi kepentingan sebagai kreditor saja;
 - c) Debitor pemberi jaminan percaya bahwa hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitor untuk diberikan jaminan fidusia dilunasi.
- 2) Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia;
 - 3) Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda;
 - 4) Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia;
 - 5) Hak mendahului (*preferen*);
 - 6) Sifat *accessoir*.

Adapun yang menjadi dasar hukum fidusia sebelum UUJF dibentuk adalah yurisprudensi arrest HGH tanggal 18 Agustus 1932 tentang perkara B.P.N. melawan *Clygnett*.⁵⁴

b. Ciri-ciri jaminan fidusia

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki ciri-ciri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 sebagai berikut :⁵⁵

- 1) Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditor penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (Pasal 27 UUJF). Pemberi fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hak yang didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil peluasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- 2) Selalu mengikuti objek yang dijamin ditangan siapapun objek itu berada *droit de suite* (Pasal 20 UUJF). Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.
- 3) Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas, sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6

dan Pasal 11 UUF). Untuk memenuhi asas tersebut, maka akta jaminan sekurang-kurangnya memuat:

- a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- d) Nilai penjaminan dan;
- e) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- f) Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (pasal 29 UUF).

Dalam hal debitor atau pemberi fidusia cidera janji, pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, atinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi atau penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Dalam hal akan dilakukan penjualan di bawah tangan, harus dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

c. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

1) Subjek Jaminan Fidusia

Subjek Jaminan Fidusia adalah pemberi dan penerima Jaminan Fidusia.⁵⁶ Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan/koperasi pemilik benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia (Pasal 1 butir 5 UUF), sedangkan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan/koperasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia (Pasal 1 butir 6 UUF).

2) Objek Jaminan Fidusia

Objek Jaminan Fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud, yang terdaftar, tidak terdaftar, yang bergerak, tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan atau Hipotek (Pasal 1 butir 4 UUF).

Mengenai objek jaminan fidusia dalam Pasal 10 UUF disebutkan bahwa:

Kecuali diperjanjikan lain :

- a) Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang dimaksud dengan “hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia” adalah

⁵⁶ *Ibid.*, Hal. 9

segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani jaminan fidusia.

b) Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi , dalam hal benda yang menjadi objek fidusia diasuransikan.

d. Hapusnya Jaminan Fidusia.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jaminan fidusia bersifat *accessoir*, maka adanya jaminan fidusia tergantung pada piutang yang dijamin pelunasannya. Oleh karena itu, apabila piutang tersebut hapus atau karena pelapasan, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus.

Dalam Pasal 25 ayat (1) UUF diatur mengenai hapusnya jaminan fidusia, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hapusnya utang yang dijaminakan dengan fidusia;
- 2) Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia; atau
- 3) Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

Seperti halnya saat pendaftaran jaminan fidusia, mengenai hapusnya jaminan fidusia juga harus diberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia oleh penerima

fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

4. Berakhirnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Berakhirnya perjanjian pembiayaan konsumen pada prinsipnya adalah sama dengan berakhirnya perjanjian-perjanjian pada umumnya, yaitu ditentukan apabila sudah dipenuhinya kewajiban debitor untuk melunasi hutang atau pembiayaan konsumennya tersebut. Berakhirnya perjanjian pembiayaan konsumen dapat disebabkan beberapa hal berikut ini :

- a. Ketentuan oleh kedua pihak, jika hal tersebut telah dituangkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan disepakati kedua belah pihak
- b. Telah tercapainya tujuan perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat, artinya bahwa perjanjian pembiayaan konsumen berakhir apabila debitor tidak memenuhi prestasinya, yaitu melunasi hutang atau pembiayaan konsumennya pada waktu yang telah ditetapkan atau sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan dalam perjanjian sehingga perjanjian pembiayaan konsumen telah selasai.
- c. Batas waktu berlakunya suatu perjanjian pembiayaan konsumen yang telah ditentukan oleh akta perjanjian yang di setujui kedua belah pihak.

- d. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan apabila terjadi peristiwa tertentu maka perjanjian pembiayaan konsumen tersebut berakhir.
- e. Pernyataan penghentian perjanjian pembiayaan konsumen yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak.
- f. kesepakatan para pihak ketika perjanjian pembiayaan konsumen sedang berjalan.
- g. Karena keputusan hakim

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tahap-Tahap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan konsumen antara PT. AFI Semarang

1. Tahap Permohonan Pembiayaan Konsumen Oleh Konsumen

Tahap permohonan pembiayaan konsumen diawali dengan pengisian formulir Aplikasi Pembiayaan Konsumen (APK) oleh calon konsumen. Konsumen menurut PT. AFI Semarang dibagi menjadi empat yaitu :

- a. perorangan;
- b. pengusaha;
- c. profesional; dan
- d. perusahaan.

Pembagian konsumen ini dimaksudkan untuk membedakan dokumen-dokumen apa saja yang harus disertakan dalam permohonan pembiayaan konsumen. Selanjutnya calon konsumen mengajukan permohonan pembiayaan konsumen kepada PT. AFI Semarang dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Perorangan
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) / identitas pemohon / pasangan / penjamin.
 - 2) Kartu keluarga (KK)
 - 3) Slip gaji
 - 4) Rekening koran, bank (tiga bulan terakhir)
- b. Pengusaha

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) / identitas pemohon / pasangan / penjamin.
- 2) Kartu keluarga (KK)
- 3) Rekening koran, bank (tiga bulan terakhir)
- 4) Surat Ijin Operasi (SIUP)
- 5) Surat keterangan domisili
- 6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

c. Professional

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) / identitas pemohon / pasangan / penjamin.
- 2) Kartu keluarga (KK)
- 3) Slip gaji
- 4) Surat Ijin Praktek Surat Keterangan Domisili
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

d. Perusahaan

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Identitas Dewan Direksi, Komisaris / Penanggung jawab
- 2) Rekening Koran, bank (tiga bulan terakhir)
- 3) Surat Ijin Operasi (SIUP)
- 4) Akte pendirian perusahaan beserta perubahan-perubahan lengkap
- 5) Tanda daftar perusahaan (TDP)
- 6) Surat Keterangan Domisili

7) Nomor Pokok Wajib Pajak

8) Laporan keuangan yang terakhir

Dalam hal permohonan pembiayaan konsumen mobil, calon-konsumen sudah menentukan dealer mobilnya, atau sebaliknya biasanya dealer mobil mempunyai rekanan lembaga pembiayaan mana yang akan dituju jika calon konsumennya ingin membeli mobil secara pembiayaan konsumen. Sama halnya dengan PT. AFI Semarang, sebagai lembaga pembiayaan juga bekerja sama dengan beberapa dealer mobil mengenai pembiayaan mobil secara pembiayaan konsumen. Melalui *Sales Person* (SP)-nya, pihak dealer juga mempunyai tugas untuk mengumpulkan data atau dokumen calon konsumen dan kemudian memeriksa dokumen-dokumen tersebut apakah sudah lengkap atau belum. Sedangkan dari pihak PT. AFI Semarang sendiri melalui SP-nya, sebelum calon konsumen mengajukan surat permohonan pembiayaan konsumen yang disertai dokumen-dokumen yang dibutuhkan, mereka memberikan penjelasan atau menegosiasikan perhitungan pembiayaan konsumen hingga didapat dengan jelas kondisi-kondisi yang dapat diterima oleh calon konsumen.

Dalam mengajukan permohonan, pihak konsumen sebagai permohonan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PT. Andalan Finance Indonesia Semarang, yaitu sebagai berikut:

- a. DP Murni > 20% dari harga OTR, tidak termasuk angsuran 1(pertama), premi asuransi, dan biaya administrasi.
- b. Untuk angsuran : minimal 35% dari penghasilan (*fixed income*) tidak termasuk uang lembur, insentif ataupun bonus.

Sebagai contoh, bila angsuran dilakukan sebanyak 12 bulan, maka si pembeli wajib membayar angsuran sebesar Rp.15.500.000 per bulan, sedangkan pada setiap pembelian mobil merk TOYOTA AVANZA tipe G dengan harga Rp. 151.000.000 dengan angsuran selama 24 bulan dengan bunga 6,5%, maka si pembeli wajib membayar angsuran sebesar Rp.

5.650.000 per bulan. Bunga yang di berikan pada si pembeli, selama 1 tahun(12 bulan) = 5,5%, 2 tahun(24 bulan) = 6,5%, 3 tahun (36 bulan) = 7,5%, 4 tahun (48 bulan) = 8,5%.

Beberapa prosedur atau tahapan yang harus dilalui oleh konsumen untuk memperoleh pembiayaan pada PT. AFI Semarang, prosedur awal pengajuan permohonan adalah :

- a. Pihak konsumen datang ke dealer (selaku supplier) yang dipilih sendiri oleh konsumen untuk membuat kesepakatan-kesepakatan mengenai:
 - 1) Tipe mobil apa yang akan diambil.
 - 2) Berapa besarnya uang muka yang harus dibayar.
 - 3) Berapa besarnya angsuran yang sanggup dibayar oleh konsumen.
- b. Setelah ditemukan kata sepakat maka pihak konsumen kemudian memberikan alamat rumah untuk disurvey.
- c. Jika pemohon seorang duda atau janda harus ada surat keterangan cerai atau surat pernyataan kematian dari instansi yang berwenang.

Usia pemohon adalah:

- 1) Usia pemohon > 21 tahun (kecuali sudah menikah).
- 2) Usia pemohon < 55 tahun untuk karyawan dan pegawai negeri.
- 3) Usia pemohon < 60 tahun untuk wiraswasta dan guru.
- 4) Usia pemohon < 65 tahun untuk guru besar.

Untuk memperoleh kredit pembiayaan konsumen pada PT Andalan Finance Indonesia Semarang maka konsumen harus memenuhi persyaratan:

- a. Foto Kartu Tanda Penduduk Suami Istri.
- b. Adanya barang jaminan.
- c. Surat Kuasa.
- d. Mengisi formulir permohonan fasilitas pembiayaan dengan pembiayaan konsumen.
- e. Menandatangani kontrak perjanjian pembiayaan.

2. Tahap Pemeriksaan Permohonan Pembiayaan Konsumen

Tahapan ini dilakukan setelah calon konsumen mengajukan permohonan pembiayaan konsumen dengan mengisi formulir APK yang disediakan oleh PT. AFI Semarang dilampiri dengan dokumen-dokumen yang diperlukan. Apabila dokumen dari calon konsumen sudah diperiksa kelengkapannya oleh SP dan dinyatakan lengkap, maka dokumen tersebut segera diberikan kepada *Credit Analyst* (CA) untuk diperiksa kembali. Tahapan ini juga dapat disebut dengan proses penanganan aplikasi pembiayaan konsumen.

Proses penanganan pembiayaan konsumen berawal dari diterimanya aplikasi pembiayaan konsumen dari calon konsumen, didefinisikan sebagai penyampaian formulir aplikasi pembiayaan konsumen yang telah diisi lengkap, berikut persyaratan dokumen atau data standar yang diisyaratkan. Prospek pembiayaan konsumen biasanya disertai dengan bukti surat konfirmasi pemesanan kendaraan atau dipenuhinya kelengkapan persyaratan awal sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku di PT. AFI Semarang sebagai indikasi keseriusan konsumen.

Penyampaian aplikasi ini dapat dilakukan secara langsung oleh calon konsumen di kantor PT. AFI Semarang atau melalui perantara dealer baik untuk kendaraan baru maupun bekas. Hal ini selanjutnya menentukan rangkaian proses penanganan dan analisis pembiayaan konsumen yang perlu dipedomani CA. Melengkapi register aplikasi pembiayaan konsumen yang secara

otomatis dapat diperoleh melalui sistem aplikasi AFI, masing-masing CA berkewajiban untuk menyelenggarakan suatu buku registrasi aplikasi manual secara konsisten atas setiap prospek pembiayaan konsumen yang ditanganinya. Adanya register pemohon pembiayaan konsumen ini akan membantu dalam melakukan perencanaan dan kontrol terhadap prospek-prospek pembiayaan konsumen yang ditanganinya, khusus dalam mengidentifikasi prospek-prospek pembiayaan konsumen yang masih perlu proses lanjutan, koordinasi dengan fungsi-fungsi terkait serta memastikan pelayanan secara berkesinambungan kepada para konsumen dan daftar rekanan.

Register aplikasi pembiayaan konsumen yang dimaksud adalah yang memuat informasi sebagai berikut :

- a. data identitas dan kontrak konsumen, nama dealer dan petugas dealer yang menangani;
- b. perincian permohonan pembiayaan konsumen yang meliputi jenis kendaraan, harga OTR, uang muka jangka waktu, tarif bunga dan asuransi;
- c. tanggal aplikasi masuk;
- d. status permohonan (disetujui/ditolak/batal/pending);
- e. tanggal surat persetujuan atau penolakan;
- f. catatan yang berisi hal-hal yang perlu tindak lanjut lebih jauh kepada dealer atau konsumen.

Penanganan awal oleh CA terhadap calon konsumen yang datang sendiri ke PT. AFI Semarang untuk memperoleh informasi pembiayaan konsumen dan mengisi formulir aplikasi pembiayaan konsumen adalah memberi penjelasan lengkap kepada calon konsumen mengenai syarat-syarat pembiayaan konsumen yang berlaku di PT. AFI Semarang kemudian meminta konsumen untuk mengisi formulir aplikasi pembiayaan konsumen. Berikut adalah tahapan-tahapan pemeriksaan permohonan pembiayaan konsumen

yang dilakukan oleh seorang CA setelah penanganan awal dilakukan :

a. Memeriksa dan memverifikasi data/dokumen

Dalam tahapan ini CA harus memeriksa lagi kelengkapan dokumen dari calon konsumen. Apabila dokumen tidak lengkap maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada SP untuk dilengkapi lagi oleh pemohon pembiayaan konsumen. Apabila CA menyatakan bahwa dokumen tersebut telah lengkap maka data tersebut akan diverifikasi untuk diproses lagi. Verifikasi pembiayaan konsumen bertujuan pokok untuk lebih memastikan kelayakan pembiayaan konsumen, khususnya yang berhubungan dengan kebenaran data atau dokumen pendukung dari calon konsumen. Verifikasi data dapat dilakukan dengan meminta konsumen menunjukkan data atau dokumen asli, melakukan analisis tambahan atau kunjungan ke tempat tinggal atau lokasi usaha calon konsumen untuk tujuan verifikasi yang lebih luas.

b. Analisis awal pembiayaan konsumen (*scorecard*)

Analisis awal pembiayaan konsumen ini dimaksudkan untuk melihat apakah seorang pemohon pembiayaan konsumen pantas mendapatkan pembiayaan konsumen atau tidak dan analisis ini dapat memberikan indikasi apakah seorang CA perlu melakukan survey atau analisis persyaratan tambahan terhadap keberadaan pemohon pembiayaan konsumen. Survey yang dimaksud adalah dengan cara seorang CA mendatangi langsung tempat tinggal pemohon pembiayaan konsumen untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pemohon pembiayaan konsumen tersebut secara finansial, bagaimanakah lingkungan tempat tinggal pemohon, apakah mendukung pemohon pembiayaan konsumen untuk melakukan kecurangan atau wanprestasi dikemudian hari. CA juga melakukan interaksi langsung dengan masyarakat yang tinggal disekitar tempat tinggal pemohon pembiayaan konsumen. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan profil pemohon pembiayaan konsumen sebanyak-banyaknya dan mendukung CA dalam mengambil keputusan. Terhadap setiap calon konsumen yang ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan atau survey, CA wajib

melengkapi laporan kunjungan dan melampirkannya dalam berkas aplikasi pembiayaan konsumen. Ringkasan hasil verifikasi atau survey yang dilakukan menjadi bagian dari pertimbangan akhir sebelum menetapkan keputusan pembiayaan konsumen.

Analisis awal pembiayaan konsumen (*scoreboard*) ini digunakan sebagai instrument pokok yang memandu pengambilan keputusan pembiayaan konsumen secara sistematis dan mencerminkan hubungan sebab akibat yang diukur. *Scoreboard* ini harus dipedomani dalam kerangka dasar atau indikasi keputusan pembiayaan konsumen sebagai berikut :

Tabel I
Kerangka Dasar / Indikasi Keputusan Pembiayaan Konsumen

Risk Rating	Score	Indikasi Keputusan Pembiayaan konsumen
A	$\geq + 45$	<p style="text-align: center;">Otomatis/langsung</p> <p>Hampir tidak diperlukan survey / analisis / persyaratan tambahan; <i>Sales Manager</i> (SM) / <i>Branch Manager</i> (BM) dapat mengambil keputusan pembiayaan konsumen</p>
B	$(-25) - (+44)$	<p style="text-align: center;">Otomatis/langsung</p> <p>Mungkin diperlukan survey / analisis / persyaratan tambahan; SM / BM dapat mengambil keputusan pembiayaan konsumen</p>
C	$(-65) - (-26)$	<p style="text-align: center;">Tidak otomatis</p> <p>Diperlukan tindak lanjut (survey / analisis /</p>

		persyaratan tambahan) dan harus mendapat persetujuan pembiayaan konsumen dari <i>General Manager</i> (GM) / Direktur Operasi (DO) / Direktur Keuangan (DK)
D	≤ -66	<p style="text-align: center;">Tidak otomatis</p> <p>Diperlukan survey / analisis / persyaratan tambahan / pertimbangan khusus dan hanya dapat disetujui oleh Direktur Operasi (DO) / Direktur Utama</p>

Penjelasan :

Keputusan “otomatis” : atribut “otomatis/langsung” untuk rating A dan B di atas harus dipahami sebagai indikasi keputusan pembiayaan konsumen yang dapat disampaikan oleh CA yang bersangkutan kepada calon konsumen dan/atau dealer, namun hukum merupakan keputusan final setelah syarat-syarat berikut terpenuhi :

- 1) Calon konsumen telah melakukan pemesanan kendaraan kepada dealer dengan disertai bukti atau konfirmasi pemesanan atau kuitansi pembayaran tanda jadi atau uang muka.
- 2) PT. AFI Semarang telah menerima dan melakukan verifikasi seluruh persyaratan pembiayaan konsumen yang wajib dipenuhi oleh calon konsumen secara memuaskan, khususnya persyaratan dokumen atau data atau persyaratan tambahan lainnya bila ada.

- 3) Khusus untuk permohonan pembiayaan konsumen kendaraan bekas, PT. AFI Semarang telah menerima kelayakan kondisi kendaraan melalui pemeriksaan fisik dan memverifikasi keabsahan dokumen kendaraan termasuk melakukan konfirmasi BPKB kepada kantor polisi/SAMSAT.
- 4) Permohonan pembiayaan konsumen telah mendapatkan persetujuan oleh SDM yang diberikan delegasi wewenang pengambilan keputusan pembiayaan konsumen sebagaimana yang ditetapkan oleh manajemen dari waktu ke waktu.

Atribut keputusan “otomatis” untuk scoreboard A/B akan semakin diperkuat, sementara kebutuhan survey atau persyaratan tambahan akan semakin mengecil dengan adanya salah satu atau lebih indikator-indikator berikut ini:

- 1) Konsumen tercatat sebagai *repeat customer* dengan catatan pembayaran yang tergolong lancar (tidak pernah menunggak dari 30 hari) atau masih merupakan konsumen aktif dengan catatan usia kontrak telah berjalan lebih dari 6 bulan dan tidak pernah menunggak di atas tujuh hari.
- 2) Konsumen membayar dengan PDCs (giro) untuk seluruh jangka waktu pembiayaan konsumen dan didukung oleh aktivitas rekening koran yang memadai.
- 3) Konsumen dapat memperlihatkan dokumen-dokumen pendukung yang mencerminkan kemampuan finansial yang

mapan seperti terikat deposito pribadi, investasi atau kepemilikan harta tetap lainnya.

- 4) Rumah tinggal konsumen adalah milik sendiri dengan disertai salinan dokumen sertifikat atas nama konsumen dan mencerminkan kapasitas keuangan yang sangat memadai sebagai acuan awal luas bangunan lebih dari 300m² atau berlokasi strategis atau di kompleks perumahan menengah ke atas.
- 5) Konsumen berusia mapan diatas 35 tahun dan memiliki pekerjaan atau usaha yang mencerminkan stabilitas keuangan atau kemampuan membayar selama masa pembiayaan konsumen atau telah berusaha/bekerja pada bidang usaha/perusahaan yang sama lebih dari lima tahun dan berpenghasilan memadai.
- 6) Terdapat referensi khusus dari dealer.

Perlu dipedomani bahwa diperolehnya salah satu atau lebih dari indikasi di atas tidak serta merta menghilangkan kebutuhan untuk melakukan survey atau investigasi lapangan atau perlunya mempertimbangkan penyediaan persyaratan atau jaminan tambahan oleh konsumen. Investigasi lebih lanjut wajib dilakukan apabila ditemukan indikasi-indikasi lain yang menggarisbawahi perlunya hal tersebut dilakukan sebelum pengambilan keputusan pembiayaan konsumen.

Repeat customer didefinisikan sebagai konsumen yang telah lunas (normal atau melalui pelunasan dipercepat) dan saat ini kembali mengajukan pendanaan baru. Untuk kepentingan analisis dan pertimbangan keputusan pembiayaan konsumen, konsumen yang telah lunas namun pernah menunggak di atas 60 hari (terlepas dari

penyelesaian/perlunasan yang dipenuhinya kemudian) dan konsumen yang kendaraannya pernah ditarik (terlepas dari lamanya tunggakan yang pernah terjadi) tidak termasuk dalam pengertian *repeat customer* dan pada dasarnya tidak memenuhi syarat untuk didanai kembali.

Keputusan kondisional atau bersyarat terhadap calon konsumen yang memiliki rating C dan D, indikasi keputusan bersifat tidak langsung dan mensyaratkan tindak lanjut oleh CA sebagai berikut :

- 1) Untuk rating C, CA bersama SM atau BM mendiskusikan atau menetapkan rekomendasi keputusan pembiayaan konsumen berupa penolakan, persetujuan dengan persyaratan tambahan atau persetujuan dengan pertimbangan tertentu dan menyampaikannya kepada DO atau DK untuk persetujuan akhir.
- 2) Untuk rating D, CA bersama SM atau BM perlu mendiskusikan atau menetapkan rekomendasi keputusan pembiayaan konsumen kepada DO atau DK untuk persetujuan akhir.

3. Tahap Rekomendasi

Setelah melakukan pertimbangan menyeluruh dan konsumen telah melengkapi seluruh persyaratan pembiayaan konsumen, *Credit Analyst* sampai pada tahap akhir untuk merekomendasikan keputusan persetujuan atau penolakan kepada *Branch Manager* atau *Sales Manager* atau SDM yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.

a. Rekomendasi ditolak

Apabila hal ini terjadi tentunya setelah dilakukan *scorecard* dan didapat indikasi keputusan kredit dengan *rating* yang buruk, dan setelah didiskusikan oleh *Sales Manager* maupun *Branch Manager* ternyata tetap tidak mendapat

persetujuan dari Direktur Operasi atau Direktur Utama, Maka *Credit Analyst* kemudian menyiapkan Surat Penolakan Pembiayaan konsumen untuk disampaikan kepada pemohon (calon konsumen).

Biasanya ada beberapa alasan mengapa rekomendasi tidak diberikan, salah satunya adalah dengan melihat analisis yang sudah dilakukan oleh *Credit Analyst* terhadap berbagai aspek yang lain mengenai kinerja pemohon (calon konsumen) dimasa datang, sehingga pihak PT. Andalan Finance Indonesia Semarang perlu berjaga-jaga terhadap kemungkinan wanprestasi oleh konsumen.

b. Rekomendasi diterima

Rekomendasi diterima, hal ini berarti rating yang diperoleh dalam *scorecard* adalah A, B atau pun C, jika yang diperoleh *rating* A hal ini berarti rekomendasi diberikan secara langsung tanpa melakukan survey lagi, sedangkan kalau rating B dan C masih dimungkinkan dilakukan survey sesuai analisis yang didapat oleh *Credit Analyst*.

Sebelum keputusan pemberian pembiayaan konsumen ditetapkan dan ditindaklanjuti dengan pembuatan kontrak pembiayaan konsumen, perubahan *scorecard* mungkin terjadi berkaitan dengan keinginan calon konsumen untuk menambah atau mengurangi besarnya uang muka atau jangka waktu.

Langkah selanjutnya *Credit Analyst* membuat proposal pembiayaan konsumen dan meminta persetujuan dari *General Manager* dan Direktur Operasi, setelah mendapat persetujuan maka membuat Surat Persetujuan Pembiayaan Konsumen (SPK) untuk permohonan kredit yang disetujui.

Dalam menindaklanjuti persetujuan pemberian pembiayaan konsumen yang telah ditetapkan, *Credit Analyst* perlu melakukan proses akhir sebagai berikut:

1) Selesaikan proses input dan cetak Daftar Pemeriksaan Data

Aplikasi (dan dicantumkan ringkasan hasil verifikasi bila ada).

- 2) Periksa ulang cetakan diatas serta kelengkapan data/dokumen pendukung yang menyertainya.
- 3) Teruskan kepada *Credit Administration* untuk memulai proses administrasi selanjutnya, yang dimulai dengan mendapatkan otorisasi keputusan pembiayaan konsumen sebagaimana mestinya.
- 4) Masukkan kedalam register aplikasi pembiayaan konsumen, keputusan pembiayaan konsumen yang ditetapkan dan dicatat, tindak lanjut yang mungkin masih diperlukan (tanpa mempengaruhi keputusan pembiayaan konsumen).

4. Tahap Persiapan Dokumen Kontrak

Dalam tahap persiapan dokumen kontrak, *Credit Administration* kemudian harus melengkapi Surat Persetujuan pembiayaan konsumen (SPK) yang sudah dilengkapi dengan nomor perjanjiannya (PJJ). Kemudian Surat Persetujuan pembiayaan konsumen (SPK) dan nomor perjanjiannya (PJJ) tersebut dikirimkan ke dealer mobil yang sebelumnya ditunjuk oleh konsumen. Konsumen menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen dan tiga kwitansi kosong yang telah diberikan oleh *Credit Administration*, kemudian *Credit Administration* mempersiapkan surat pernyataan dealer, surat ini berupa surat pernyataan penyerahan BPKB mobil, setelah ditandatangani surat tersebut *Credit Administration* mengirimkan Surat Pesanan Kendaraan (PO) kepada konsumen, apabila konsumen telah menerima kendaraan dan menandatangani surat tersebut, kemudian diserahkan kepada *Credit Administration* lagi untuk diperiksa lagi dokumen-dokumen tersebut, agar mengetahui dokumen yang belum lengkap.

Dokumen-dokumen yang harus disertakan dalam Dokumen Permohonan Pencairan Pembiayaan konsumen untuk disetujui adalah:

- a. Dokumen Kontrak Asli.

- b. Surat Pesanan Kendaraan (PO) yang sudah ditandatangani oleh konsumen.
- c. Foto copy tanda terima (*Delivery Order*) yang telah ditandatangani oleh konsumen.
- d. Surat Perintah Bayar dari dealer (asli)
- e. Surat Pernyataan dealer untuk penyerahan BPKB.
- f. Kwitansi uang muka dari dealer dan 3 (tiga) kwitansi kosong dari konsumen (semuanya asli)
- g. Dokumen lengkap untuk aplikasi konsumen.

5. Tahap Pencairan Pembiayaan konsumen

Setelah semua proses dan dokumen lengkap yang disebut diatas, maka permohonan pembiayaan kredit sudah dapat dicairkan, *Credit Administration* juga memasukan data kendaraan konsumen untuk asuransi serta mengkoordinasikan pembayaran dan pengiriman polis kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk dan dengan persetujuan oleh konsumen.

PT. AFI Semarang mempunyai tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan pengambilan pembiayaan konsumen. Masing-masing petugas mempunyai fungsi dan tanggung jawab masing-masing, yaitu : ⁵⁷

a. *Sales Person*

Mengumpulkan data dan dokumen konsumen serta memeriksa kelengkapan dokumen tersebut.

b. *Credit Analyst*

- 1) Memeriksa dan memverifikasi data/dokumen calon konsumen dari *Sales Person*.

⁵⁷ Ratriana Heksa Setiawan, wawancara, *Credit Analyst*, tanggal 18 Mei 2010, pukul 09.00.

- 2) Melakukan *Scorecard* (indikasi keputusan pembiayaan konsumen), apabila indikasi tersebut tidak disetujui maka *Credit Analyst* membuat Surat Penolakan dan mengirimkan kepada konsumen, apabila indikasi direkomendasikan maka membuat proposal pembiayaan konsumen untuk persetujuan manajemen.
- 3) Menyiapkan Surat Persetujuan Kredit untuk permohonan pembiayaan konsumen yang disetujui.

c. *Credit Administration*

- 1) Melengkapi dan mengirim SPK lengkap dengan Nomor Perjanjian Kontraknya.
- 2) Melengkapi dokumen kontrak dan 3 (tiga) kwitansi kosong.
- 3) Menyiapkan dan mengirimkan surat pernyataan dealer.
- 4) Apabila sudah ditandatangani pejabat dealer yang berwenang, menyiapkan surat pesanan kendaraan (PO).
- 5) Mengirim PO ke dealer.
- 6) Memeriksa dan memverifikasi perlengkapan seluruh dokumen.
- 7) Menyiapkan permohonan pencairan pembiayaan konsumen.
- 8) Memproses permohonan pencairan pembiayaan konsumen yang telah disetujui.
- 9) Menginput data kendaraan dan konsumen untuk asuransi.

10) Mengkoordinasikan pembayaran dan pengiriman polis kepada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk dan disetujui oleh konsumen.

Selain itu dokumen-dokumen yang diperlukan juga dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Konsumen :

Formulir Aplikasi Pembiayaan Konsumen (APK)

b. Pihak PT. Andalan Finance Indonesia Semarang :

- 1) *Sales contact plan.*
- 2) Surat/korespondensi dengan dealer.
- 3) Profil data konsumen termasuk hasil *scorecard*.
- 4) Surat Penolakan (jika tidak ada rekomendasi).
- 5) Proposal Pembiayaan Konsumen.
- 6) Surat Persetujuan Pembiayaan Konsumen (SPK).
- 7) Perjanjian Pembiayaan konsumen.
- 8) Kwitansi uang muka dari dealer.
- 9) Tiga kwitansi kosong yang ditandatangani konsumen.
- 10) Polis asuransi.

6. Perjanjian Baku pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT.

Andalan Finance Indonesia Semarang

Dalam hal perjanjian Pembiayaan Konsumen antara PT. AFI Semarang dengan konsumen masuk dalam jenis perjanjian standar atau baku yang isi perjanjiannya merupakan kesepakatan dua atau lebih pihak-pihak atau perjanjian standar timbal balik. Perjanjian jenis ini, isi dan persyaratannya yang dibuat oleh pihak PT.AFI yang dituangkan didalam suatu perjanjian tertulis yang nantinya

ditandatangani oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian, dari segi bentuknya perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. AFI Semarang dan konsumen merupakan perjanjian standar menyatu, yaitu perjanjian dengan format biasa tetapi yang sebagian besar persyaratannya telah distandardisasi sebelum digunakan dalam suatu transaksi bisnis, akan tetapi bagian-bagian tertentu masih terbuka untuk negoisasi yang diintegrasikan ke dalam satu perjanjian yang utuh. Bagian-bagian tertentu yang masih bisa dirubah misalnya tentang lamanya jangka waktu pinjaman, tanggal angsuran, benda yang menjadi jaminan, dan sebagainya. Perjanjian baku (*standard*) ini dianggap mengikat setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan masing-masing pihak menandatangani perjanjian tersebut.

7. Bunga Pada Pembiayaan Konsumen

Pada PT. Andalan Finance Indonesia Semarang terdapat 2 sistem bunga:

a. Bunga flat

Sistem bunga yang ditetapkan oleh PT. Andalan Finance Indonesia Semarang kepada konsumen yang pada awal angsuran sampai dengan angsuran yang terakhir sama tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan walaupun suku bunga bunga Bank Indonesia (BI rate) mengalami kenaikan ataupun penurunan.

b. Bunga menurun

Sistem bunga yang setiap bulannya mengalami penurunan yang dihitung pada sisa pokok terakhir, sistem ini lebih menguntungkan apabila pokok angsuran tinggi, walaupun terlihat tinggi tetapi apabila dihitung sampai akhir angsuran hasilnya akan sama dengan Bunga Flat.

Tabel II
Kenaikan Suku Bunga Per Tahun Yang Dialami
PT. Andalan Finance Indonesia Semarang.

Tahun	Besar Bunga Per Tahun

2007	6%
2008	8%
2009	7%
2010	6%

8. Asuransi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu unsur yang selalu melekat dalam setiap perjanjian pembiayaan adalah adanya resiko, resiko kerugian dan kerusakan sehubungan dengan objek pembiayaan menurut pembagian kepentingan dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen dapat dilimpahkan kepada pihak konsumen. Dalam perjanjian konsumen antara pihak PT. AFI dengan konsumen asuransi dialihkan pada PT. Asuransi Wahana Tata.

Asuransi yang diberikan kepada konsumen tersebut ada dua macam jenis .⁵⁸

a. TLO (*Total Last Only*)

Jenis asuransi yang hanya menjamin kerugian akibat kehilangan, kecurian, terbakar hangus atau kecelakaan yang menyebabkan kerugian di atas 75%.

b. *Conprehensive*

Jenis asuransi yang mengganti kerugian dari sekecil apapun kerusakan yang diderita mobil.

Apabila terjadi peristiwa yang dimaksud, maka pihak konsumen harus melaporkan kejadian kerusakan tersebut paling lambat 2X24 jam kehilangan dua bulan terhitung sejak saat kejadian kepada PT. AFI Semarang dan kepada kantor polisi setempat.

Untuk klaim asuransi pihak konsumen harus melengkapi, menandatangani dan mengirimkan segera dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Laporan kehilangan dari kantor polisi setempat.
- b. Fotocopy KTP dan SIM A.
- c. Fotocopy STNK dan kunci kontak
- d. Form klaim (laporan kejadian)
- e. Copy polis
- f. Laporan kepulisan

9. Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Pembiayaan

Konsumen di PT. Andalan Finance Indonesia

Perusahaan pembiayaan konsumen PT. Andalan Finance Indonesia Semarang dalam praktek pembebanan jaminan pembiayaan konsumen tidak diikat atau dapat dikondisikan menggunakan jaminan fidusia atau tidak, dengan kriteria : ⁵⁹

1. Apabila konsumen mengambil pembiayaan dibawah Rp. 200.000.000,- tidak dikenakan jaminan fidusia, tetapi apabila konsumen tersebut terlihat tidak baik/memiliki itikat buruk maka PT. AFI langsung memfidusiakan.
2. Apabila konsumen mengambil pembiayaan diatas Rp.200.000.000,- pihak PT. AFI langsung memfidusiakan dari awal perjanjian.

Apabila konsumen hendak mengambil pembiayaan dibawah Rp.200.000.000,- pihak konsumen dengan mengetahui istri/suami membuat surat kuasa untuk pihak PT. Andalan Finance Indonesia

⁵⁹ Agus Priyambodo, wawancara, *Branch Manager*, tanggal 19 Mei 2010, pukul 10.00.

Semarang mendaftarkan tersebut kepada notaris untuk jaminan fidusia apabila konsumen akan melakukan indikasi untuk wanprestasi, apabila konsumen yang memberi kuasa tersebut meninggal dalam praktek yang mengetahui kuasa istri atau suami menginginkan melanjutkan maka kuasa dapat beralih, maka kedudukan pemberikuasa dapat beralih kepada istri/suami almarhum, hal ini bertentangan dengan pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dapat dikatakan bahwa praktek pembebanan jaminan dengan fidusia dilakukan dengan memilah-milah per *person* dan kasus per kasus, pada saat perusahaan pembiayaan dihadapkan pada konsumen yang bermasalah pendaftaran jaminan fidusia baru dilakukan oleh perusahaan, pada praktek dimana akta jaminan fidusia dibuat dengan perjanjian di bawah tangan maka akan sangat sukar buat perusahaan pembiayaan tersebut untuk mengeksekusi benda jaminan, tanpa lewat gugatan pengadilan.

Sebenarnya pembebanan jaminan fidusia untuk kepentingan lembaga pembiayaan, sebagai pihak yang akan dilindungi dalam perjanjian pembiayaan, namun terlihat ada indikasi bahwa sebenarnya biaya pembebanan jaminan fidusia tanpa sepengetahuan konsumen telah dikenakan kepada konsumen, konsumen hanya dijelaskan tidak secara lengkap tentang fidusia dan menandatangani tumpukan dokumen, bagi konsumen, dikarenakan adanya kepentingan untuk memiliki barang pembiayaan, maka pembebanan biaya jaminan fidusia tidak menjadi masala, hanya saja biaya tersebut jangan terlalu tinggi, adapun prosedur pendaftaran jaminan fidusia diserahkan sepenuhnya kepada lembaga pembiayaan.

Pada praktek diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pemberian jaminan fidusia tidak sesuai dengan Undang-Undang no 42 tahun 1999, seharusnya pada perjanjian jaminan fidusia dilakukan dengan pembuatan akta notariil, dihadapan notaris, pada pelaksanaan pembuatan jaminan fidusia secara notariil harus dihadiri oleh pihak PT. AFI dan pihak konsumen, sehingga apabila syarat tersebut tidak terpenuhi dianggap perjanjian tersebut batal demi hukum yang menyebabkan pihak PT. AFI tidak dapat menyita benda jaminan.

10. Pembiayaan konsumen pada PT. Andalan Finance Indonesia

Semarang menggunakan pengakuan utang.

Akta pengakuan hutang pada umumnya dibuat oleh kreditur, dengan alasan untuk kepentingan keamanan kreditnya disamping itu untuk mempercepat prosedur penyelesaian sengketa apabila debitur wanprestasi.⁶⁰ Pentingnya menggunakan pengakuan utang adalah bahwa PT. Andalan Finance Indonesia Semarang padahal ini sebagai Kreditur memperoleh jaminan akan pengembalian utangnya, akta pengakuan hutang tidak termasuk salah satu jaminan hutang yang diatur oleh undang-undang karena bukan sebagai jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, akan tetapi kreditur merasa keamanan piutangnya terjamin.

Terdapat beberapa kelebihan dan keuntungan mudah untuk membuktikan utang konsumen dan mudah prosedur penyelesaian utangnya, agar lebih aman lagi bagi PT. Andalan Finance Indonesia Semarang bukan hanya menggunakan pengakuan utang tetapi diikuti juga dengan fidusia karena jaminan kebendaan memberikan kepastian hukum bagi PT. Andalan Finance Indonesia Semarang sebagai kreditur, benda yang dijaminakan kepada kreditur oleh konsumen sebagai debitur sudah spesial untuk kepentingan pelunasan debitur apabila debitur tersebut wanprestasi.

B. Penyelesaian Dalam Hal Apabila Pihak Konsumen Wanprestasi

1. Wanprestasi yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perjanjian

Pembiayaan Konsumen

Ada beberapa wanprestasi yang sering dilakukan konsumen sebagai debitor adalah sebagai berikut :⁶¹

- a. Konsumen tidak membayar angsuran kewajiban angsuran bulanan atau suku bunga yang telah ditetapkan mengenai

⁶⁰ Gatot Supramono, *op.cit.*, hal. 179.

⁶¹ *Loc.cit.*

jumlah angsuran bulanan yang disebabkan berubahnya suku bunga.

- b. Konsumen memindahtangankan atau menjual kepada pihak ketiga barang yang masih dalam ikatan pada PT. AFI Semarang.
- c. Debitor melakukan penunggakan-penunggakan atas kewajibannya angsuran suku bunga selama dua kali berturut-turut maupun tidak dalam satu tahun sehingga konsumen mendapat peringatan terakhir.
- d. Konsumen melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam perjanjian semata-mata menurut pertimbangan dari kreditur.

Permasalahan sehubungan dengan perjanjian pembiayaan konsumen, tidak semua permasalahan dari macetnya pembiayaan konsumen, pembiayaan konsumen bermasalah dapat diartikan sebagai pembiayaan konsumen yang pembayaran kembali hutang pokok tidak sesuai dengan persyaratan atau ketentuan awal perjanjian. Permasalahan yang timbul menurut penulis sebenarnya dapat diketahui pada awal pembayaran pembiayaan konsumen, tanda-tanda yang dapat dilihat pada awal terjadinya pembiayaan konsumen macet :

- a. Tunggakan, pada umumnya tunggakan-tunggakan yang terjadi dalam pembayaran kembali merupakan tanda-tanda akan timbulnya suatu pembayaran pembiayaan konsumen yang macet.
- b. Informasi yang salah, bahwa laporan yang diberikan nasabah/konsumen berisi hal-hal yang keliru yang disebabkan oleh keteledoran.

- c. Masalah-masalah lain yang dapat mempengaruhi jalannya kredit misalnya kematian konsumen, bencana alam, kepekaan terhadap gejala memburuk dari keadaan perekonomian konsumen tersebut.

Sepandai apapun analisis pembiayaan konsumen yang dilakukan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan konsumen yang diajukan kepada pihak PT. AFI Semarang kemungkinan terjadi masalah tetap ada. Timbulnya pembiayaan konsumen yang bermasalah memang tidak dapat dihindari oleh PT. AFI Semarang, dan ada pula barang yang dibiayakan, dijual atau dipindahtangankan pada pihak ketiga, pembiayaan konsumen yang bermasalah adalah pembiayaan konsumen dengan kolektibilitas macet dan yang diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet, yang dimaksud dengan kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga oleh debitor (konsumen) serta tingkat kemungkinan diterimanya kembalinya dana tersebut.

Credit Analist yang menangani analisis pembiayaan konsumen harus selalu mendeteksi masalah yang kemungkinan terjadi yang dapat menyebabkan pembiayaan konsumen tersebut tidak dapat dibayar oleh konsumen sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Pengenalan secara dini tentang hal-hal yang akan timbul dalam pelaksanaan pembiayaan kredit sangat penting agar PT. AFI Semarang sebagai debitor dapat mempersiapkan langkah-langkah pengamanan dan menyusun strategi yang tepat sehingga terjadinya risiko dengan kerugian yang besar akan dapat dihindari. Penyebab terjadinya pembiayaan konsumen bermasalah dapat dilakukan secara sistematis langsung terhadap konsumen, gejala-gejala yang diperoleh secara langsung dari konsumen patut untuk diidentifikasi dan perlu diwaspadai dengan menentukan langkah-langkah yang tepat yang harus diambil untuk melakukan perbaikan sebelum pembiayaan konsumen menjadi bermasalah.

Identifikasi masalah dalam pembiayaan konsumen sangat diperlukan sekali, selain membuat kesepakatan untuk penyelesaian tunggakan adalah penting untuk mencari tahu alasan atau sebab-

sebab mengapa konsumen menunggak. Tanpa informasi yang jelas tentang alasan konsumen menunggak maka kemungkinan bahwa tunggakan akan tetap terjadi di masa yang akan datang, meskipun tunggakan untuk bulan sebelumnya telah dibayar. Analisis terhadap kondisi ekonomi, politik dan sosial yang dapat mempengaruhi kemampuan bayar seorang konsumen harus dilakukan untuk mencegah meningkatnya tunggakan yang akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

Definisi dari pelanggaran pembiayaan konsumen yang serius berhubungan erat dengan niat atau karakter seseorang, bukan dengan lamanya konsumen tersebut menunggak. Oleh karena itu pembayaran tunggakan tidak dapat dikategorikan sebagai penyelesaian akhir dari masalah yang direkomendasikan. Penanganan masalah tunggakan membutuhkan upaya khusus yang sangat hati-hati untuk menghindari konflik dengan konsumen. Berikut adalah kriteria pelanggaran pembiayaan konsumen yang terjadi di PT. Andalan Finance Indonesia Semarang : ⁶²

- a. Konsumen dengan sengaja melakukan atau mencoba melakukan penipuan agar pembiayaan konsumen disetujui.
- b. Konsumen dengan sengaja menghindari kewajiban kredit misalnya melarikan diri.
- c. Konsumen melakukan tindakan dengan alasan apapun untuk tidak lagi memenuhi kewajiban kreditnya.
- d. Konsumen menjual atau memindahtangankan barang yang masih dalam ikatan pihak PT. AFI Semarang kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan kepada pihak PT. AFI.

Sebagai contoh dari pelanggaran pembiayaan konsumen yang serius adalah konsumen dengan sengaja mengalihkan barang yang masih dalam ikatan perjanjian pada PT. AFI Semarang tanpa pemberitahuan kepada pihak PT. AFI Semarang sesuai dengan

perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati antara konsumen dan PT. AFI Semarang, yang terdapat pada Pasal 14 dan Pasal 23 Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut ⁶³:

a. Pasal 14

“Selama berlangsungnya perjanjian, knsumen tidak akan menjual, meminjamkan, menyewakan, mengagunkan, menjaminkan atau memindahtangankan barang baik sebagian maupun seluruhnya dengan cara bagaimanapun kepada orang atau pihak lain manapun, serta tanpa persetujuan terlebih dahulu dari kreditor, konsumen tidak akan mengadakan penambahan/pengurangan/ perubahan baik bentuk, permesinan,fungsi maupun mutu barang.”

b. Pasal 23

“Konsumen tidak dapat mengalihkan kepada pihak ketiga manapun di luar perjanjian ini sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya yang diperolehnya melalui perjanjian ini.”

PT. AFI Semarang telah melakukan usaha yang maksimal untuk menghubungi konsumen baik melalui surat maupun kunjungan langsung namun tidak berhasil. Dalam hal PT. AFI Semarang telah berhasil menghubungi atau menemuinya, konsumen tetap menolak melaksanakan kewajibannya. Konsumen tidak mematuhi ketentuan sesuai dengan persyaratan atau perjanjian pembiayaan yang telah disepakatinya.

2. Langkah-langkah Penyelesaian Wanprestasi Di PT. Adalan

Finance Indonesia Semarang

Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh PT. Andalan Finance Indonesia Semarang dalam mengatasi masalah kredit yang dilakukan oleh konsumen⁶⁴:

a. Musyawarah

⁶³ *Loc.cit.*

⁶⁴ *loc. cit.*

Apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen maka upaya yang lebih dulu dilakukan adalah penyelamatan kredit dengan jalan musyawarah. Musyawarah disini dilakukan antara PT. AFI Semarang sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitor untuk mencari jalan keluar yang terbaik sehingga masalah pembiayaan konsumen tersebut dapat diatasi dan tidak merugikan para pihak.

b. Penagihan

Penagihan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh PT. AFI Semarang dengan mendatangi kantor atau rumah dan menagih atau meminta debitor (konsumen) untuk segera melunasi kreditnya. Penagihan yang dilakukan oleh petugas dari PT. AFI Semarang ini meliputi penagihan tunggakan angsuran ataupun penagihan tunggakan denda atau biaya keterlambatan lainnya. Tindak lanjut yang diambil oleh PT. AFI Semarang meliputi penjualan kendaraan untuk pelunasan kredit ataupun penarikan kendaraan.

c. Pemberian Somasi atau Teguran

Somasi atau peringatan oleh PT. AFI Semarang kepada debitornya agar debitor memenuhi ketentuan perjanjian kredit khususnya pembayaran angsuran yang sesuai dengan jumlah dan jatuh tempo waktu pembayaran yang telah disepakati pada awal perjanjian. Somasi atau peringatan ini dapat dilakukan sendiri oleh kreditur (PT. AFI Semarang) langsung kepada debitor (konsumen), dan dapat dilakukan sebanyak tiga kali Surat Peringatan (SP pertama = keterlambatan 7 hari, SP kedua = 20 hari, SP tiga = 30 hari) dan secara kekeluargaan. Setelah SP ketiga tidak juga diindahkan oleh konsumen maka PT. Andalan Finance Indonesia Semarang melakukan penarikan kendaraan. Mengenai penarikan kendaraan ini tidak dipandang sebagai penagihan, tetapi sebagai salah satu pilihan upaya terakhir penyelesaian tunggakan. Apabila debitor (konsumen) tidak dapat melunasi maka kendaraan yang ditarik tidak dapat diambil kembali dan semua biaya yang sudah dikeluarkan oleh debitor untuk uang muka dan angsuran-angsuran sebelumnya dianggap hangus.

Somasi menurut Pasal 1238 KUHPerdata adalah suatu peringatan atau perintah yang disampaikan pengadilan kepada debitur untuk segera membayar atau menyelesaikan hutangnya kepada kreditor. Somasi melalui pengadilan ini penting untuk memperkuat pembuktian bahwa debitur telah ingkar janji, akan tetapi untuk menentukan bahwa debitur cidera janji tidak harus ditentukan adanya somasi dari pengadilan, tetapi dapat dilihat dari lewatnya waktu pembayaran dari jadwal yang telah ditentukan. Somasi secara yuridis tidak mempunyai akibat hukum memaksa debitur untuk membayar, artinya jika debitur yang disomasi tidak memenuhi atau menghiraukan somasi tersebut maka kreditor tidak dapat memaksa. Namun dengan adanya somasi tersebut diharapkan debitur akan membayar tunggaknya atau paling tidak menunjukkan itikad baik kalau mau membayar tunggaktunggaknya.

d. Gugatan Kepada Debitur (Konsumen)

Apabila somasi atau teguran yang diberikan oleh pihak PT. AFI Semarang tidak mendapat tanggapan dari debitur yang telah melakukan wanprestasi, maka tindakan yang diambil selanjutnya adalah mengajukan gugatan perdata kepada debitur (konsumen yang wanprestasi) ke Pengadilan Negeri. Mengenai Pengadilan Negeri mana yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa tersebut sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati mengenai penyelesaian secara hukum. Biasanya gugatan secara hukum ini diajukan karena kreditor menemukan indikasi bahwa debitur mempunyai itikad tidak baik terhadap perjanjian yang telah disepakati.

Berdasarkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan pembiayaan konsumen yang sudah diuraikan diatas, PT. AFI Semarang tetap mengandalkan penyelesaian secara kekeluargaan. Dalam arti selagi masih ada jalan musyawarah yang dapat ditempuh maka tidak akan begitu saja mengajukan ke gugatan, akan tetapi jika dirasa memang sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan sudah ada indikasi perbuatan yang melanggar hukum maka PT. AFI Semarang bertindak tegas untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum. Cara kekeluargaan yang ditempuh tentunya diharapkan akan mendapatkan dan

menghasilkan kesepakatan antara pihak untuk memperbaiki pembiayaan konsumen dan diikuti dengan perjanjian baru. Adapun bentuk penyelamatan yang dilakukan oleh PT. Andalan Finance Indonesia (AFI) Semarang adalah sebagai berikut :

a. *Rescheduling* (Penjadwalan kembali)

Mengubah syarat-syarat pembiayaan konsumen yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya.

b. *Restructuring* (Penataan kembali)

Perubahan syarat-syarat pembiayaan konsumen berupa penambahan jumlah angsuran maupun pengurangan jumlah angsuran yang disesuaikan dengan kondisi debitur yang disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

c. *Recorditioning* (Persyaratan kembali)

Perubahan sebagian atau seluruhnya syarat-syarat pembiayaan konsumen yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal jumlah pembiayaan konsumen.

Penyelesaian diatas merupakan langkah alternatif sebelum dilakukan penyelesaian melalui lembaga yang lebih bersifat yudisial. Perubahan perjanjian merupakan solusi permanen atas penyelesaian suatu masalah atau situasi jangka panjang yang tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara lain yang ada dibawah ini :

a. Penurunan pendapatan secara tetap karena berkurangnya pendapatan lembur, sakit dan berhenti bekerja untuk jangka waktu yang lama.

b. Perubahan yang menyangkut penambahan atau pengurangan jangka waktu pembiayaan konsumen.

c. Perubahan yang menyangkut penambahan atau pengurangan jumlah angsuran.

- d. Konsumen memberikan pembayaran sekaligus untuk beberapa angsuran dan konsumen meminta untuk memperpendek jangka waktu pembiayaan dan penurunan jumlah angsuran.
- e. Perubahan jumlah denda atau biaya keterlambatan lainnya, baik karena permintaan konsumen atau tindakan hukum.

Berdasarkan penyelesaian permasalahan pembiayaan konsumen yang sudah dijelaskan diatas, masih ada beberapa hal yang dapat membatalkan kontrak perjanjian antara PT. AFI Semarang dengan konsumen yaitu dokumen kontrak pembiayaan konsumen belum ditandatangani oleh konsumen, dokumen kontrak pembiayaan konsumen sudah ditandatangani oleh konsumen tetapi pencairan dana ke dealer mobil belum di proses, ataupun pencairan dana ke dealer telah diproses (hanya berlaku untuk alasan penggantian kendaraan dengan jenis yang sama).

Sebenarnya permasalahan dalam pembayaran pembiayaan konsumen dapat dihindari jika ada keterbukaan antara pihak konsumen dengan kreditor. Hal ini berarti dari awal perjanjian dibuat sudah harus ada itikad baik antara masing-masing pihak. Pihak konsumen sendiri jika merasa tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran angsuran kredit dapat mengajukan permohonan penundaan angsuran untuk beberapa waktu kepada pihak PT AFI Semarang. Hal ini tentunya akan lebih menguntungkan kedua belah pihak dan tidak akan terjadi wanprestasi dikemudian hari. Langkah-langkah untuk memproses permohonan penundaan pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :

- a. Konsumen menulis surat permohonan kepada PT. AFI Semarang untuk menunda pembayaran angsuran. Surat tersebut harus berisi alasan mengapa penundaan dilakukan dan pernyataan kapan angsuran tersebut akan dibayar.

- b. Berdasarkan surat dari konsumen tersebut, *Staff Credit Administration* (SCA) akan menghitung jumlah denda yang timbul karena penundaan pembayaran.
- c. Setelah itu, SCA menyiapkan permohonan persetujuan untuk diperiksa oleh *Credit Administration Manager* (CAM) dan disetujui oleh *Director Operasi*. Permohonan ini hanya dapat disetujui apabila konsumen mempunyai catatan pembayaran yang bagus.
- d. Setelah disetujui, SCA akan memberitahukan kepada konsumen jumlah dan kapan pembayaran harus dilakukan.

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan penulis diatas dan berdasarkan keterangan dari para narasumber, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa suatu permasalahan itu tidak akan terjadi bila antara kedua belah pihak sama-sama mempunyai itikad baik. Selain itu jika timbul suatu permasalahan dikemudian hari dimana debitor terlambat atau tidak membayar angsuran sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan maka masih ada jalan penyelesaian secara kekeluargaan atau musyawarah. Dari pihak PT. Andalan Finance Indonesia sendiri juga harus mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh konsumen dalam hal pembayaran angsuran sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. PT. AFI Semarang sendiri tentunya mempunyai kebijakan-kebijakan perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan konsumen baik yang disebabkan karena keterlambatan pembayaran angsuran ataupun sebab-sebab yang lainnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang sudah diuraikan pada Bab III sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tahapan-tahapan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Andalan Finance Indonesia Semarang dengan Konsumen adalah tahap permohonan pembiayaan konsumen oleh konsumen, tahap pemeriksaan permohonan pembiayaan konsumen, tahap rekomendasi, tahap pencairan pembiayaan, Dokumen kontrak di buat terlebih dahulu oleh PT. Andalan Finance Indonesia Semarang dan di serahkan kepada pemohon kredit, agar pemohon pembiayaan konsumen dapat memahami isi Dokumen kontrak, apabila pemohon menyetujui , maka ada penandatanganan dokumen kontrak, dan menggunakan pengakuan hutang dan pentingnya menggunakan pengakuan utang adalah bahwa PT. Andalan Finance Indonesia Semarang padahal ini sebagai Kreditur memperoleh jaminan akan pengembalian utangnya, akta pengakuan hutang tidak termasuk salah satu jaminan hutang yang diatur oleh undang-undang karena bukan sebagai jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, akan tetapi kreditur merasa keamanan piutangnya terjamin.

2. Wanprestasi yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dan penyelesaiannya.
 - a. konsumen tidak membayar angsuran bulanan atau suku bunga yang sudah ditetapkan.
 - b. Konsumen memindahtangankan atau menjual kepada pihak ketiga barang yang masih dalam ikatan pada PT. AFI Semarang.
 - c. Konsumen melakukan penunggakan-penunggakan atas kewajibannya angsuran suku bunga selama dua kali berurutan maupun tidak dalam satu tahun sehingga konsumen mendapat peringatan terakhir.
 - d. Konsumen melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam perjanjian semata-mata menurut pertimbangan dari kreditur.

Berikut adalah langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam mengatasi masalah kredit :

1. Musyawarah.
2. Penagihan.
3. Pemberian Somasi atau Teguran.
4. Gugatan Kepada Debitor (Konsumen).

B. Saran-saran

Dengan kesadaran akan terbatasnya pengetahuan yang ada pada diri penulis, penulis mencoba untuk menyumbangkan saran dengan harapan mudah-mudahan saran ini dapat bermanfaat. Adapun saran-saran adalah :

1. Pemerintah hendaknya lebih mempertegas peraturan mengenai perjanjian pembiayaan konsumen dimana nantinya bagi para pelaku pelanggaran pembiayaan konsumen diberikan sanksi yang tegas.
2. PT. Andalan Finance Indonesia Semarang juga sebaiknya lebih berhati-hati dalam menentukan siapa calon konsumennya sehingga pelanggaran-pelanggaran pembiayaan konsumen yang serius tidak terjadi dikemudian hari.
3. Bagi konsumen yang memperoleh pembiayaan konsumen di PT. Andalan Finance Indonesia Semarang, hendaknya mempergunakan fasilitas pembiayaan tersebut dengan sebaik-baiknya dan tidak menyalahgunakan pembiayaan konsumen tersebut, sehingga tidak merugikan pihak kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2000, ***Hukum Perdata Indonesia, Cetakan ke III***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1990, ***Hukum Perikatan***, Alumni, Bandung.
- , dan Rilda Murniati, 2000, ***Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan***, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Budi Rachmad, 2002, ***Multi Finance Sewa Guna Usaha Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen***, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2001, ***Metode Penelitian Hukum***, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2009, ***Perbankan dan Masalah Kredit***, Rineka Cipta, Jakarta.
- H. Salim HS, 2006, ***Perkembangan Hukum Kontrak diluar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1995, ***Metodologi Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum***, Mandar Maju, Bandung.
- J. Satrio, 1992, ***Hukum Perjanjian***, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1993, ***Beberapa Segi Hukum Standarisasi Perjanjian Kredit,(seminar Masalah Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit***, Surabaya.
- , 2002, ***Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia***, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 1986, ***Segi Segi Hukum Perjanjian***, Alumni, Bandung,

Mariam Darus Badruzaman, 1983, ***Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan***, Alumni, Bandung.

-----, 1980, ***Aneka Hukum Bisnis***, Alumni, Bandung.

-----, 1991, ***Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai dan Fidusia***, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 1995, ***Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 1999, ***Hukum Tentang Pembiayaan***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2003, ***Jaminan Fidusia***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Purwahid Patrik, 1993, ***Hukum Perdata I (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)***, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Perdata Universitas Diponegoro, Semarang.

-----, 1996, ***Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian***, Badan Penerbit UNDIP, Semarang

-----, 1993, ***Peranan Perjanjian Baku dalam Maysarakat, (Makalah dengan Seminar Masalah Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit)***, Surabaya

-----, dan Kashadi, 2004, ***Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT***, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang

-----, dan Kashadi, 2004, ***Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT***, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang

R. Subekti, 1987, ***Hukum perjanjian***, Cetakan ke XII, Intermasa, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1980, ***Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri***, PT. Ghalia Indonesian, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1998, ***Hukum Acara Perdata Indonesia***, Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta.

Sutan Remi Sjahdeini, 1995, ***Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang dalam Perjanjian Kredit Bank***, Jakarta.

Sunaryo, 2008, ***Hukum Lembaga pembiayaan***, Sinar Grafika, Jakarta.

Sri Sudewi Sofwan, 1980, ***Hukum Perutang Bagian II***, Seksi Hukum Perdata UGM, Yogyakarta.

Wirjono Projodikoro, 1979, ***Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu***, Sumber, Bandung.

